

**STUDI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PALIPPIS
KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROPINSI SULAWESI BARAT**

***PALIPPIS BEACH TOURISM DEVELOPMENT STUDY
BALANIPA DISTRICT POLEWALI MANDAR REGENCY
WEST SULAWESI PROVINCE***

**SURYANI
MPW 4507018**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
MAKASSAR
2009**

**STUDI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PALIPPIS
KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROPINSI SULAWESI BARAT**



TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

UNIVERSITAS

BOSOWA

Program Studi
Perencanaan Wilayah Dan Kota



Disusun dan diajukan oleh

SURYANI

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
MAKASSAR
2009

TESIS

STUDI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI PALIPPIS KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT

Disusun dan diajukan oleh

SURYANI

Nomor Pokok MPW 45 07 018

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 22 Agustus 2009
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui
Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Ir. Hazairin Subair, MS.

Ketua

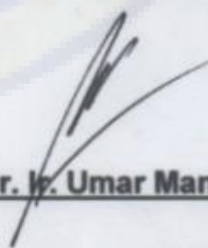

Dr. Ir. Umar Mansyur, MT.

Anggota


Direktur Program Pascasarjana
Universitas "45"


Dr. Marwan Mas, SH, MH.

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota


Dr. Ir. Umar Mansyur, MT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “Studi Pengembangan Objek Wisata Pantai Palippis Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat”.

Tesis ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas “45” Makassar

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan hambatan dalam penulisan Tesis ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Penulis, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka Tesis ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. DR. Ir. Hazairin Subair, MS., selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis dalam merampungkan Tesis ini;
2. Bapak DR. Ir. Umar Mansyur, MT., selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada Penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen Pembimbing;

3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Staf dan Karyawan pada Pengelola Program Pasca Sarjana Universitas "45" Makassar atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama Penulis mengikuti pendidikan;
4. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan pendidikan;
5. Pihak-pihak lain yang memberikan bantuan moril dan materil yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu;
6. Bapak H. Achmad Saeni, Bapak Aco Jurair, Bapak Bahar, Bapak Harwijaya, K'Tia, Uli, Ani, terima kasih untuk kebersamaannya.
7. Ayahanda H. Muh. Yusuf Tanda dan Ibunda Hj. Agustina Sanda Litha yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, perhatian dan doa yang tiada pernah putus, serta kakak dan adik-adik tercinta yang telah banyak memberikan bantuan selama ini.
8. Teristimewa untuk Suami dan Anakku, terimakasih atas pengertian, cinta dan kasih sayangnya.

Akhir kata, Penulis berharap Tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan pariwisata di masa mendatang.

Polewali, Agustus 2009

Penulis
SURYANI

ABSTRAK

SURYANI, Studi Pengembangan Objek Wisata Pantai Palippis Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat (dibimbing oleh Hazairin Subair dan Umar Mansyur).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui potensi pengembangan objek wisata Pantai Palippis di Desa Bala yang meliputi daya tarik objek wisata, tingkat pengelolaan dan aksesibilitas, (2) Menetapkan strategi pengembangan objek wisata Pantai Palippis.

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas kondisi pada wilayah studi, sesuai dengan data yang diperoleh selanjutnya digunakan analisis SWOT untuk membantu menstrukturkan masalah dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Hasil studi menunjukkan bahwa (1) Potensi objek wisata Pantai Palippis yang menjadi andalan untuk menarik wisatawan agar semakin banyak berkunjung adalah pasir putih, ombak, karang, pepohonan alami dan panorama alami (2) Sesuai dengan hasil Analisis SWOT maka dapat dirumuskan prioritas utama strategi pengembangan objek wisata Pantai Palippis adalah: meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata, mengembangkan budaya asli daerah dengan tetap memelihara budaya yang ada, meningkatkan dan mengembangkan daya tarik potensi kawasan, melakukan kegiatan promosi wisata untuk menarik wisatawan.

ABSTRACT

SURYANI, Palippis Beach Tourism Development Study Balanipa District Polewali Mandar Regency West Sulawesi Province (supervised by Hazairin Subair dan Umar Mansyur).

The study aims to (1) Determine the potential development of Palippis Beach tourism objects in Bala Village which includes attraction of attractions, level of management and accessibility, (2) Establish Palippis Beach tourism development strategies.

Method used is descriptive analysis which aims to clearly describe the conditions in the study area, in accordance with the data obtained, then the SWOT analysis is used to help structure problems in the internal and external environment.

Results of the study show that (1) Palippis Beach tourism potential that is a mainstay for attracting tourists so that more and more visits are white sand, waves, coral, natural trees and natural panorama (2) In accordance with the results of the SWOT Analysis the main priorities for development strategies can be formulated Palippis Beach tourism objects are: increasing the construction of facilities and infrastructure in tourism objects, developing the native culture of the area while maintaining existing culture, increasing and developing the potential attraction of the region, conducting tourism promotion activities to attract tourists.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Batasan Dan Pengertian Dalam Kepariwisata

2.2 Hirarki Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

2.3 Pengertian Pengembangan Pariwisata

2.4 Pengertian Pantai

2.5 Tata Ruang Kawasan Pantai

2.6 Sempadan Pantai

2.7 Pengembangan Kawasan Tepian Pantai

2.8 Standar dan Konsep Pengembangan Kepariwisata

2.9 Komponen Pengembangan Pariwisata

2.10 Kriteria Pengembangan Kawasan Pariwisata

2.11 Pertimbangan Dalam Pengembangan Pariwisata

2.12 Konsep Tata Ruang Pariwisata

2.13 Konsep Pengembangan Objek Wisata

2.14 Lokasi dan Waktu Penelitian
2.15 Jenis dan Sumber Data

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2 Jenis dan Sumber Data
3.3 Metode Pengumpulan Data
3.4 Metode Analisis Data

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar
4.2 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Polewali Mandar
4.3 Tinjauan Umum Wilayah Kecamatan Balanipa
4.4 Tinjauan Khusus Objek Wisata Pantai Palippis

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Kedudukan Regional
5.2 Analisis Kondisi Fisik Kawasan
5.3 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah
5.4 Kondisi Topografi
5.5 Kondisi Hidrologi
5.6 Iklim
5.7 Vegetasi
5.8 Analisis Pola Penggunaan Lahan Terhadap Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Palippis
5.9 Aksesibilitas Kawasan Objek Wisata Pantai Palippis
5.10 Analisis Perkembangan Jumlah Arus Wisatawan
5.11 Analisis Fasilitas Pendukung dan Utilitas Kawasan
5.12 Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Wisata

5.13 Analisis Pengembangan Penzanaan
5.14 Analisis Arahana Pengembangan Objek Wisata Pantai
Palippis

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

6.2 Saran

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Luas lahan, kelas Topografi dan Kelas Lereng
2. Tabel 2. Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2008
3. Tabel 3. Fungsi dan Permukaan Jalan di Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2008
4. Tabel 4. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kecamatan Balanipa
Tahun 2008
5. Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan
Balanipa Tahun 2008
6. Tabel 6. Kelas Lereng dan Bentuk Objek Wisata Pantai Palippis
7. Tabel 7. Luas Objek Wisata Pantai Palippis menurut Penggunaan
Lahan Tahun 2008
8. Tabel 8. Jumlah Fasilitas Pendukung Objek Wisata Pantai Palippis ..
9. Tabel 9. Perkembangan Jumlah Pengunjung Tahun 2008
- Tabel 10. Analisis Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai
Palippis

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar
2. Gambar 2. Peta Topografi Kabupaten Polewali Mandar
3. Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Balanipa
4. Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian
5. Gambar 5. Vegetasi pada Lokasi Penelitian
6. Gambar 6. Fasilitas Pendukung Objek Wisata
7. Gambar 7. Objek Wisata Palippis
8. Gambar 8. Peta Pengembangan Zona

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri pariwisata sebagai mesin baru penggerak perekonomian sebuah kawasan sudah seharusnya mendapat porsi yang lebih dalam kerangka pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan potensi pariwisata pada semua daerah ada dan siap untuk dikembangkan. Selain itu efek berganda yang akan ditimbulkan dari industri pariwisata akan mampu untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya seperti pada sektor jasa, perdagangan dan transportasi, yang kesemuanya itu akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan sektor pariwisata dewasa ini semakin penting artinya, sebab selain dapat meningkatkan Devisa Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dapat memperluas kesempatan kerja dan menambah pendapatan bagi masyarakat luas serta dapat memperkenalkan budaya setempat.

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Keseluruhan wilayah perairan pedalaman, territorial dan laut lepas merupakan ekosistem (mata rantai kehidupan) dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata.

Pengembangan kawasan wisata pantai merupakan salah satu konsep yang sangat relevan dengan kondisi serta karakteristik Negara Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut : Pertama, fakta fisik bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ± 18.110 pulau, dengan panjang garis pantai 108.000 Km. Wilayah lautan meliputi 5,8 juta Km² atau 70% dari luas total territorial Indonesia. Kedua, sepanjang garis pantai dan bentangan perairan laut terkandung kekayaan sumber daya alam yang berlimpah mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adapun jasa-jasa lingkungan berupa pemandangan pantai dan laut yang indah yang dapat dijadikan sebagai asset pariwisata. Ketiga, semakin bertambahnya jumlah penduduk, secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan sumber daya alam sebagai input dalam proses produksi atau proses pembangunan lainnya. Di lain pihak sumber daya yang ada di daratan (territorial) semakin menipis, sehingga mendorong masyarakat berpaling ke kawasan tepian dan lautan untuk memenuhi segenap kebutuhan sumber daya alam bagi kelangsungan pembangunan (Rokhmin Dahuri, dkk, 2001: 1)

Propinsi Sulawesi Barat memiliki potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk mendapatkan perhatian dalam proses pembangunannya termasuk di dalamnya melakukan perencanaan, pengambilan keputusan untuk merencanakan setiap program

pembangunan pariwisata, dalam kerangka kepariwisataan Nasional dengan visi pengembangan yang diemban oleh Propinsi Sulawesi Barat adalah destinasi wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara dengan menonjolkan aspek warisan budaya, kekayaan tradisi maritim, objek wisata tepian dan keanekaragaman flora dan fauna yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka peranan industri pariwisata untuk mendukung pengembangan kepariwisataan Sulawesi Barat sangat diperlukan, salah satunya dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayahnya 2002,30 Km² terdiri dari 16 Kecamatan di mana secara topografis terdiri dari kawasan pantai dan bukan pantai. Dalam kerangka pengembangan kepariwisataan Propinsi Sulawesi Barat, maka Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah tujuan wisata, yang mana jika ditinjau dari segi administrasi daerah ini berdekatan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur, sehingga nantinya dapat dikembangkan menjadi satu paket promosi wisata dengan daerah-daerah tersebut. Salah satu potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Polewali Mandar adalah objek wisata dan daya tarik wisata Pantai Palippis.

Pantai Palippis merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali

Mandar. Pantai Palippis ini memiliki aksesibilitas yang baik karena terletak kurang lebih 30 km dari Kota Polewali yang merupakan ibukota Kabupaten Polewali Mandar. Letaknya berada pada jalur jalan poros antar kabupaten sehingga memudahkan untuk menjangkau tempat wisata ini. Objek wisata Pantai Palippis ini dapat dicapai dengan moda transportasi darat seperti mobil pribadi, angkutan umum dan motor. Dengan kondisi demikian, maka kawasan Pantai Palippis ini memiliki peluang yang baik untuk dikelola dan dikembangkan sebagai salah satu kawasan objek wisata di Kabupaten Polewali Mandar.

Kurangnya dana dalam pengembangan potensi kepariwisataan di Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam penyediaan dan pengadaan sarana dan fasilitas pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu objek wisata. Kesulitan lain yang juga menjadi kendala dalam penyediaan sarana pariwisata seperti tempat penginapan, tempat beristirahat, serta warung makan adalah kurangnya lahan yang tersedia untuk pembangunan sarana pariwisata tersebut. Lahan-lahan yang ada di sekitar kawasan Pantai Palippis merupakan milik masyarakat dan masyarakat masih sangat kurang yang ingin memberikan lahan mereka untuk pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dan kurang

dilibatkannya masyarakat dalam pengembangan objek wisata Pantai Palippis.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka akan dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Potensi apa saja yang dapat dikembangkan pada objek wisata Pantai Palippis.
- b. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk pengembangan objek wisata Pantai Palippis.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui potensi pengembangan objek wisata Pantai Palippis di Desa Bala yang meliputi daya tarik objek wisata, tingkat pengelolaan dan aksesibilitas.
- b. Menetapkan strategi pengembangan objek wisata Pantai Palippis.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun secara akademis :

1. Secara praktis, menjadi masukan yang konstruktif bagi pihak yang berkepentingan utamanya pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahan informasi dan kajian bagi pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
3. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pihak-pihak lain menyangkut pengembangan pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian di atas maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu lingkup materi dan lingkup wilayah.

1.5.1 Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini difokuskan kepada aspek potensi objek wisata pada wilayah penelitian dan aspek pengembangan yang meliputi daya tarik objek wisata, tingkat pengelolaan, aksesibilitas dan strategi pengembangan.

1.5.2 Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah meliputi wilayah administrasi Kabupaten Polewali Mandar secara makro dan Desa Bala yang meliputi kawasan objek wisata Pantai Palippis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Batasan Dan Pengertian Dalam Kepariwisataan

Dalam pembangunan dewasa ini, sektor pariwisata dapat menjadi sektor unggulan yang diharapkan dapat berkembang dan dapat ditingkatkan. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi dan bagian dari pembangunan nasional. Pengaruhnya terhadap perkembangan lingkungan alami maupun binaan juga memerlukan perhatian dalam rangka pemanduan pembangunan pariwisata dan lingkungan.

Kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang sesungguhnya bukan berarti "*tourisme*" (bahasa Belanda) atau "*tourism*" (bahasa Inggris). Kata pariwisata sinonim dengan pengertian "tour", hal ini dapat dilihat dari kata pariwisata yang terdiri dari dua suku kata yaitu kata "peri" adalah berkali-kali, berputar-putar dan "wisata" adalah perjalanan dan berpergian. Dari pengertian secara etimologi di atas maka disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari satu tempat ke tempat lainnya (Yoeti, 1989 : 112).

Saleh Wahab, dalam bukunya *An Introduction on Tourism Theory* mengemukakan bahwa batasan pariwisata hendaknya memperhatikan anatomi gejala-gejala yang terdiri dari tiga unsur,

yaitu : manusia (man) ialah orang yang melakukan perjalanan, waktu ialah waktu yang digunakan selama dalam perjalanan, dan daerah tujuan wisata.

Berdasarkan ketiga unsur di atas Saleh Wahab merumuskan pengertian pariwisata sabagai suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar dan mendapatkan pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu Negara (di luar negeri) meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialami di tempat di mana ia memperoleh pekerjaan tetap (Hadinoto, 1996 : 160).

Menurut defenisi yang lebih luas, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam dan ilmu (Indro, 1989 : 54).

UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan menjelaskan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat untuk menikmati objek-objek dan daya tarik wisata.

Menurut A. J. Burkat dan S. Medik, pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut (Soekadijo, 1996 : 3).

Kepariwisata adalah suatu faktor yang potensial dalam usaha meningkatkan ekonomi di bidang jasa perhotelan dan kerajinan rakyat serta pemasaran barang-barang dari hasil produksi dalam negeri. Kegiatan-kegiatan pariwisata baik itu nasional sifatnya maupun regional dapat menciptakan serta memperluas lapangan kerja dan member pengaruh terhadap perkembangan sektor pembangunan lainnya.

Menurut Soekadijo (1996 : 269) bahwa penyelenggaraan pariwisata bertujuan :

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
- b. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
- c. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- d. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kemakmuran rakyat.
- e. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

2.2 Hirarki Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

Perencanaan pariwisata dengan berpedoman pada hirarki perencanaan sehingga terjadi sinergis antara perencanaan secara makro dengan perencanaan mikro yang dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan tersebut. Hirarki perencanaan meliputi : tingkat internasional, regional, nasional, sub nasional dan semakin rendah hirarkinya. Perbedaan hirarki ini membedakan fokus perencanaan, setiap tingkat berfokus pada kekhususan yang berbeda. Meskipun tidak selamanya dimungkinkan, perencanaan ini dilakukan secara berurutan, mulai dari yang umum menuju yang semakin spesifik. Perencanaan pada tingkat umum memberikan kerangka dan arahan bagi perencanaan yang lebih spesifik. Secara singkat perbedaan-perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Perencanaan Pariwisata Internasional (PPI)

Perencanaan Pariwisata Internasional terfokus pada kebijakan pengembangan secara Internasional, meliputi :

- 1) Jaringan transportasi.
- 2) Arus dan program wisata antar Negara.
- 3) Rencana pengembangan yang komplementer antara negara-negara bertetangga untuk bersama-sama menciptakan daya tarik, mencakup penyediaan sarana serta prasarana penunjang.
- 4) Program promosi dan pemasaran terpadu.

b. Perencanaan Pariwisata Nasional (PPN)

Perencanaan Pariwisata Nasional terfokus pada kebijakan suatu negara dalam mengembangkan sektor pariwisata, meliputi:

- 1) Kebijakan nasional pengembangan pariwisata.
- 2) Rencana struktur tata ruang pariwisata yang mencakup lokasi-lokasi prioritas pengembangan yang didasarkan pada daya tarik utama, penentuan pintu gerbang internasional dan jaringan pelayanan transportasi domestik atau internasional.
- 3) Pertimbangan-pertimbangan prasarana pokok lainnya.
- 4) Jumlah, jenis dan kelas fasilitas akomodasi dan lainnya.
- 5) Rute-rute wisata utama dengan jaringan penghubungnya.
- 6) Struktur organisasi, kebijakan investasi dan perijinan.
- 7) Strategi pemasaran dan program promosi.
- 8) Program pendidikan dan pelatihan.
- 9) Pengembangan fasilitas dan standar desain.
- 10) Aspek-aspek pelaksanaan di tingkat nasional : pentahapan, strategi jangka pendek, menengah dan panjang.

c. Perencanaan Pariwisata Wilayah (PPW)

Perencanaan pengembangan pariwisata di tingkat wilayah berfokus pada kebijakan yang meliputi :

- 1) Kebijakan wilayah
- 2) Rencana struktur tata ruang pariwisata wilayah mencakup jaringan transportasi antar wilayah dan inter wilayah, lokasi

pengembangan dan kawasan wisata, dan jenis serta lokasi sumber daya wisata dan daya tarik wisata.

- 3) Jumlah, jenis dan kelas fasilitas penunjang akomodasi.
- 4) Analisis dampak yang lebih spesifik di tingkat wilayah.

d. Perencanaan Pariwisata Daerah (PPD)

Perencanaan pengembangan pariwisata di tingkat kabupaten berfokus pada kebijakan yang meliputi :

- 1) Kebijakan pengembangan pariwisata kabupaten yang disesuaikan dengan Pola Dasar dan Renstra.
- 2) Rencana struktur tata ruang pariwisata kabupaten yang mencakup jaringan transportasi antar dan inter kabupaten sampai ke objek-objek utama.
- 3) Penentuan kota kabupaten sebagai pintu gerbang menuju ke objek-objek utama dan kebutuhan fasilitas pendukung.
- 4) Rencana jaringan utilitas, pendukung kawasan-kawasan dan lokasi objek-objek menarik lainnya.

e. Perencanaan Pariwisata Kawasan (PPK)

Perencanaan dan pengembangan pariwisata kawasan adalah mengembangkan suatu kawasan dengan objek dan daya tarik wisata yang beragam jenisnya, seperti : kawasan wisata Nusa Dua Bali, Toraja, Bira, Lombok dan sebagainya.

PPK ini berfokus pada :

- 1) Penentuan lokasi daya tarik wisata, termasuk kawasan konservasi.
- 2) Arahan lokasi hotel dan akomodasi lainnya, pertokoan dan fasilitas lainnya, tempat rekreasi dan taman.
- 3) Sistem jaringan transportasi, pedestrian dan terminal local.
- 4) Perencanaan prasarana pendukung : air bersih, listrik, saluran air limbah, air hujan, pembuangan sampah dan telekomunikasi.

Sebaiknya pada tahapan ini pengarahan tidak terbatas pada zonasi, tetapi juga sampai pada kriteria perancangan, seperti : bentuk arsitektur, lansekap, ketinggian bangunan, pola arus wisatawan serta pemanfaatan fasilitas.

2.3 Pengertian Pengembangan Pariwisata

Pengembangan diartikan sebagai suatu proses yang dinamis dengan menggunakan segala sumber daya yang ada guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Pengembangan ini dalam bentuk wujud visi maupun wujud mutu dalam artian kualitas dan kuantitas (Gunawan, 1997 : 27).

Ada beberapa elemen dasar yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pariwisata yang berwawasan dan terpadu. Pertama, melakukan zonafikasi dalam rangka memisahkan usaha pariwisata dengan kegiatan pertanian atau kegiatan usaha lainnya. Kedua,

pengembangan pariwisata sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pasar dan kesiapan masyarakat.

Pariwisata harus dikembangkan secara bertahap agar masyarakat punya cukup waktu untuk memahami dan beradaptasi dengan kegiatan pariwisata. Pemerintah melalui para perencananya hendaknya mulai menginvestasi dalam bidang infrastruktur dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini akan menyebabkan usaha-usaha pariwisata berskala kecil dapat berkembang dengan baik.

Ada beberapa hal yang menunjang/menentukan pengembangan dari suatu objek wisata yang dikemukakan oleh Inskeep (1991 : 67) bahwa terdapat beberapa hal yang menentukan pengembangan suatu objek wisata yaitu :

❖ **Atraksi**

Tujuan wisata yang sukses tidak hanya bergantung pada kemampuannya untuk menarik wisatawan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk bisa mempertahankan wisatawan, maksudnya wisatawan yang berkunjung berulang-ulang tidak hanya sekali saja berarti bahwa daerah tujuan wisata tersebut harus mempunyai bermacam-macam atraksi.

❖ **Budaya**

Pengembangan yang sesuai adalah dengan menggabungkan seluruh area lingkungan kebudayaan ke dalam kepariwisataan baik dari segi arkeologi, kerajinan tangan masyarakat sekitar,

makanan tradisional, upacara-upacara adat kebiasaan, kebiasaan hidup sehari-hari, tarian dan arsitektur tradisional.

Kesemuanya itu harus saling mendukung agar bisa menciptakan wisatawan baru.

❖ **Tenaga Kerja**

Tenaga kerja yang tersedia haruslah diberi pelatihan khusus dan diberi motivasi. Pelatihan ini bisa berupa pengajaran bahasa asing sesuai dengan kebanyakan wisatawan mana yang datang, bisa juga berupa pelatihan tata cara melayani tamu.

❖ **Infrastruktur dan Superstruktur**

Yang termasuk infrastruktur adalah jalan, lahan parkir, terminal, listrik, sistem pembuangan limbah dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk superstruktur adalah hotel, restoran, toko dan berbagai kegiatan usaha lain. Superstruktur ini tidak akan ada tanpa perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Kurangnya infrastruktur yang tersedia akan menghambat pengembangan dan pertumbuhan suatu tempat usaha.

❖ **Transportasi**

Merupakan hal yang penting disediakan karena tanpa adanya transportasi akan sulit sekali bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata.

❖ Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung ini bisa berupa kantor polisi, balai kesehatan, bank, pasar dan lain-lain. Menurut Nelson dalam bukunya yang berjudul *Tourism and Sustainable Development : Monitoring, Planning and Managing (1993)* dikatakan pengembangan pariwisata adalah suatu proses. Dalam proses itu sendiri diperlukan perencanaan induk. Ada empat macam yang terkandung di dalamnya, yaitu :

a. Penggunaan Lahan

Lahan merupakan sumber paling penting yang harus dikelola dalam rencana pengembangan pariwisata. Lokasi suatu objek wisata dan daya tarik pemandangan dapat menarik pengunjung untuk datang ke objek tersebut.

b. Transportasi

Transportasi juga merupakan hal penting yang harus dipikirkan dalam pengembangan pariwisata karena meskipun objek pariwisata tersebut mempunyai keistimewaan, tidak akan banyak pengunjung yang datang jika fasilitas transportasinya tidak tersedia. Bagi perjalanan dengan menggunakan mobil, pertimbangan penting yang harus termasuk adalah: jalan yang nyaman, aman dan menarik. Adanya petunjuk jalan yang jelas, cukup besar untuk bisa dilihat dengan mudah oleh wisatawan.

c. Fasilitas Pendukung

- *Akomodasi*

Harus ada fasilitas akomodasi untuk menampung wisatawan yang datang dan tempat untuk menarik wisatawan. Akomodasi hendaknya disesuaikan dengan tipe wisatawan yang datang.

- *Industri pendukung lainnya*

Industri pendukung dalam semua pelayanan barang atau aktivitas yang dibutuhkan oleh wisatawan. Contohnya: objek wisata lain di sekitarnya, toko eceran, galeri seni, rumah makan, festival, dll.

d. Infrastruktur

Yang termasuk dalam elemen ini adalah:

- Air bersih
- Tenaga listrik dan komunikasi
- Sistem pembuangan limbah dan air
- Fasilitas perawatan kesehatan
- Keamanan

2.4 Pengertian Pantai

Wilayah pantai merupakan wilayah laut yang masih menerima pengaruh dari daratan. Pengaruh yang dimaksud meliputi fenomena transportasi material sedimen yang dibawa oleh sungai-sungai yang

bermuara ke laut atau ke wilayah yang masih sering atau masih dimanfaatkan oleh manusia (Suwardjoko, 2007 : 11)

Pantai adalah daerah yang merentang dari daratan sampai ke bagian terluar dari batasan pulau, yang kurang lebih bersesuaian dengan daerah yang secara bergantian banjir atau terkena fluktuasi muka laut selama periode kuartener akhir. Untuk pantai yang ada di Indonesia terdapat 3 jenis pantai, yaitu:

a. Pantai Paparan

Merupakan pantai yang didasari dengan pengendapan yang lebih dominan (pantai netral) dengan ciri:

- Muara sungainya mempunyai delta, air terus mengandung lumpur sedimentasi.
- Pantainya mempunyai kedalaman yang teratur dengan perubahan kedalaman yang juga teratur.
- Daratan pantainya sangat lebar dan dapat mencapai lebih dari 20 Km.

b. Pantai Samudera

Merupakan pantai yang berhadapan langsung dengan samudera yang merupakan pantai di mana proses erosinya lebih dominan.

Dengan ciri muara sungainya berada dalam teluk, delta tidak berkembang dengan baik serta mempunyai air yang cukup jernih.

Jenis pantai ini terdapat di sepanjang Pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa, Selatan dan Utara Nusa Tenggara, Pulau Timur

Pantai Utara Irian Jaya, Utara Seram, Timur dan Barat Pulau Halmahera dan Pantai Timur serta Utara Pulau Sulawesi.

c. Pantai Pulau

Merupakan pantai yang mempunyai bentuk melingkari pulau yang dapat dibentuk oleh endapan sungai antara lain batu gamping dan endapan gunung api.

Jenis pantai ini terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar dari ujung barat hingga timur Indonesia, seperti pantai di Kepulauan Nias, Riau, Pulau Seribu, Sengkang, Selayar, Banda dan Sangir Talaud.

2.5 Tata Ruang Kawasan Pantai

Tata ruang kawasan pantai merupakan suatu kegiatan pengelolaan secara terpadu dengan menetapkan peruntukan ruang kawasan pantai dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi, lingkungan dan keamanan.

Fungsi tata ruang kawasan pantai adalah merupakan suatu usaha/upaya yang terpadu untuk melestarikan fungsi dari kawasan pantai yang meliputi kebijaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dan pengendaliannya.

Setiap usaha pengelolaan wilayah pesisir, sebelumnya diperlukan perencanaan yang matang dalam mengalokasikan

sumber daya alam. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses persiapan pembuatan keputusan untuk pelaksanaan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

2.6 Sempadan Pantai

Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/II/1980 menjelaskan mengenai kriteria lokasi kawasan lindung dan termasuk di dalamnya adalah sempadan pantai yang merupakan kawasan perlindungan setempat.

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Tujuan perlindungan adalah melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah sederetan tepi pantai sekurang-kurangnya berjarak 100 meter diukur dari pasang tertinggi ke arah darat, dengan pertimbangan pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada.

2.7 Pengembangan Kawasan Tepian Pantai

Menurut Masengi (1999: 122) hamparan kawasan pantai dapat dibedakan atas beberapa bentuk/jenis alam (geomorfologi pantai yang mencakup wilayah di antara lautan dan daratan sehingga hamparannya terdiri atas bagian daratan dan laut. Bagian daratan

termasuk pantai adalah apabila pengaruh lautan masih ditemukan baik yang bersifat fisik kimiawi maupun yang bersifat organis. Sedangkan bagian lautan yang termasuk pantai adalah apabila masih ditemukan pengaruh daratan seperti pengaruh sedimentasi dan pengaruh mixing dari air sungai dengan salinitasi yang umumnya di bawah 32 PPT untuk daratan tropis.

Pengertian lain tentang kawasan pantai berasal dari proyek sains LOICZ (Land Ocean Interaction In Coastal Zone) menyatakan bahwa kawasan pantai adalah daerah yang merentang daratan sampai ke bagian luar dari batas pulau atau kurang lebih bersesuaian dengan daerah yang secara bergantian atau terkena fluktuasi muka laut selama periode kuartener akhir. Dalam kawasan pantai ini terdapat sejumlah ekosistem pantai yang variatif mulai dari lautan rawa, rawa pasang surut, laguna, daerah pasang surut, terumbu karang, mangrove, inshore dan offshore, semuanya dibedakan oleh proses dan sifat biotik dan abiotik lingkungannya.

2.8 Standar dan Konsep Pengembangan Kepariwisata

Standar adalah persyaratan relatif yang dapat berfungsi sebagai pegangan atau kriteria dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Standar merupakan alat untuk membantu penilaian-penilaian pencapaian sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya dan dapat juga dipakai untuk membandingkan

efektivitas relatif jasa pelayanan rekreasi di suatu tempat perbandingan dengan tempat-tempat atau populasi lain yang serupa.

Menurut Inskeep (1991: 67), standar terutama dipakai untuk:

- a. Perencanaan sistem; penyiapan suatu rencana komprehensif tempat rekreasi atau taman hiburan dan integrasi guna lahan public dan privat berskala komunitas.
- b. Perencanaan tapak/fasilitas; penentuan jenis-jenis fasilitas apa saja yang diinginkan untuk mungkin dibangun di suatu tapak.
- c. Rasionalisasi; justifikasi atau prioritas untuk pembangunan fasilitas rekreasi yang diberikan pada unit masyarakat atau unit politis.
- d. Pengukuran; penggunaan indikator kualitatif atau kuantitatif untuk menganalisis kinerja atau efektivitas suatu tempat rekreasi atau sistem taman hiburan.

Standar yang dipilih dapat berbeda-beda untuk setiap tempat, karena kondisi lingkungan, masyarakat dan nilai yang berlaku di suatu tempat akan berbeda dengan di tempat lain agar dapat efektif dalam situasi apapun, standar yang dipakai harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Orientasi masyarakat; standar harus mencerminkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah.
- b. Kelayakan-kelayakan harus dapat dibuat dalam periode perencanaan dan dana yang tersedia. Standar yang secara

lingkungan politis dan ekonomis tidak realistis untuk suatu periode perencanaan daerah tertentu akan sulit diterapkan.

c. Kepraktisan; standar harus mudah diterapkan, direvisi atau diproyeksikan dalam suatu pengambilan keputusan perencanaan. Standar harus didasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan yang menyeluruh dan data terbaik yang tersedia. Standar yang sifatnya kondisional atau berdasarkan kira-kira tidak dapat digeneralisasikan pada unit komunitas atau unit perencanaan yang serupa.

d. Relevansi; standar harus relevan dengan masyarakat dan waktu. Jika suatu standar bersifat timeless dan berlaku untuk semua tempat, maka artinya standar tersebut akan menjadi tidak peka terhadap perubahan pesat seperti gaya hidup masyarakat dan ekonomi. Standar selalu dapat direvisi bilamana perlu.

Pemakaian serangkaian standar yang mencerminkan kriteria-kriteria di atas merupakan salah satu aspek penting suatu proses perencanaan, yaitu untuk membantu menganalisa kebutuhan eksisting dan kebutuhan proyeksinya. Jika digunakan secara tepat, standar dapat dijadikan pegangan untuk memperkirakan:

a. Luas lahan dan jumlah fasilitas yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat umum maupun suatu populasi tertentu.

b. Jumlah orang yang dapat dilayani oleh suatu tempat rekreasi atau fasilitas tertentu.

- c. Kememadaian suatu tempat atau fasilitas terhadap jumlah pemakai potensial di daerah layanannya.

2.9 Komponen Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata hendaknya didasarkan pada pemahaman terhadap sistem kepariwisataan itu sendiri. Sistem kepariwisataan yang mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Wisatawan sebagai kelompok sasaran dengan segmentasi yang jelas.
- b. Objek daya tarik wisata, termasuk kegiatan-kegiatannya.
- c. Jaringan transportasi yang menghubungkan tempat asal dan tujuan.
- d. Sarana dan prasarana pendukung, baik fisik maupun kelembagaan.

Inskeep (1991 : 98) menggambarkan komponen-komponen tersebut sebagai berikut:

- a. Atraksi wisata dan kegiatan wisata
- b. Lingkungan dan kondisi sosial budaya
- c. Transportasi
- d. Keamanan
- e. Akomodasi
- f. Infrastruktur

g. Institusi Kelembagaan

h. Fasilitas dan pelayanan lainnya

2.10 Kriteria Pengembangan Kawasan Pariwisata

Proses pengembangan suatu objek wisata / kawasan wisata diawali dengan pemikiran mengenai landasan pengembangan kawasan, baik ditinjau dari peran pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan wilayah dengan wilayah pengembangan sekitarnya. Kelayakan pengembangan objek wisata menempati kedudukan penting sebagai titik tolak kelanjutan rencana yang lebih operasional dan lebih detail.

Pengembangan produk pariwisata dapat diciptakan dengan dasar citra pengembangan objek pariwisata yang diharapkan. Citra pengembangan objek pariwisata digali dari potensi sumber daya alam dan menciptakan atraksi yang menarik sesuai dengan sistem sosial dan nilai budaya masyarakat setempat. Pengembangan objek wisata ini dengan memperhatikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Salah satu tujuan pariwisata adalah ingin dekat dan menyatu dengan alam, pengalaman wisatawan pada suatu objek wisata hendaknya dapat memberikan kesan bagaimana keadaan lingkungan ala mini akan memberikan suasana baru yang menyenangkan, perencanaan tata ruang pariwisata harus

banyak memberikan peluang agar potensi alam benar-benar dimanfaatkan, baik pemanfaatan secara visual maupun kontak langsung alam sebagai bagian dari pariwisata itu.

b. Penanganan Masalah Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan dalam pengembangan kawasan wisata sangat diperlukan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Keterpaduan yang serasi dengan lingkungan, yaitu antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, hendaknya menjadi perhatian utama.

c. Pertimbangan ekonomi Tata Ruang

Lokasi kawasan hendaknya dipertimbangkan agar mudah dicapai dan dijangkau oleh lapisan masyarakat yang membutuhkannya. Apabila objek wisata ini belum ditetapkan sebaiknya dilakukan proses seleksi penentuan lokasi dengan pertimbangan faktor ekonomi lokasi.

d. Organisasi dan Struktur Tata Ruang

Penataan ruang pada prinsipnya adalah menetapkan pengelompokan komponen sarana pariwisata, sehingga membentuk keterkaitan antara berbagai kawasan fungsional, terciptanya keteraturan urutan kegiatan yang membutuhkan hubungan fungsional yang berkesinambungan, memisahkan yang saling mengganggu, kompleks dan kesan monoton.

e. Sistem Transportasi dan Media Pelayanan

Efisiensi pergerakan untuk mencapai objek wisata dikaitkan dengan ketersediaan pelayanan pariwisata merupakan syarat penting dalam perencanaan tata ruang kawasan pariwisata. Kelancaran dan efisiensi kegiatan ini harus dapat mengarahkan dan memadukan berbagai kegiatan seperti: fasilitas akomodasi, jalan penghubung dan parker, pusat fasilitas pelayanan umum, kawasan yang mempunyai pemandangan alam, kawasan alam terbuka dan lainnya. Untuk itu dibutuhkan media pelayanan pariwisata yang tepat dan efisien.

f. Manajemen Pelaksanaan Program

Suatu kawasan tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa adanya pelaksanaan program yang menangani pemasaran dan promosi, informasi dan pengarahannya, pembinaan lingkungan sosial serta institusi pelayanan yang baik.

2.11 Pertimbangan Dalam Pengembangan Pariwisata

Dalam perencanaan pengembangan pariwisata ada beberapa elemen dasar yang perlu dipertimbangkan: (i) melakukan pezonangan dalam rangka memisahkan kegiatan pariwisata dengan kegiatan lainnya, dan (ii) pengembangan dilakukan dengan bertahap sesuai dengan perkembangan pasar dan kesiapan masyarakat.

Pengembangan kawasan wisata harus dikembangkan secara bertahap agar masyarakat punya waktu dalam memahami dan beradaptasi dengan kegiatan pariwisata. Beberapa pertimbangan dalam pengembangan objek wisata, yaitu:

- a. Pengembangan pariwisata hendaknya menggunakan teknik konservasi budaya, artinya melalui pengembangan pariwisata secara langsung dapat membantu melestarikan atau bahkan menghidupkan kembali kesenian dan tarian tradisional; seperti kerajinan tangan, pakaian daerah, upacara adat dan gaya arsitektur daerah yang hampir punah, selanjutnya dibuatkan panduan untuk mengukur keaslian, terutama jika dipertontonkan kepada wisatawan.
- b. Libatkan masyarakat pada setiap proses pengambilan keputusan perencanaan pengembangan pariwisata di daerah tertentu agar dapat memberikan sumbang saran tentang jenis pariwisata yang cocok dan dapat dikembangkan.
- c. Buatlah suatu ketentuan umum, bahwa atraksi wisata harus didasari aspek budaya dan lingkungan lokal dan bukan merupakan atraksi tiruan atraksi asing.
- d. Laksanakan program pendidikan masyarakat, khususnya di daerah yang dikembangkan mengenai konsep, manfaat dan masalah serta bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan wisatawan yang berbeda latar belakang budaya

sehingga kontak sosial antara masyarakat tuan rumah dan pendatang dapat bermanfaat, sehingga tercipta hubungan timbal balik.

2.12 Konsep Tata Ruang Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata menuntut adanya konsep yang jelas mengenai tata ruang pariwisata, di mana hal tersebut berdampak bagi perkembangan wilayah sekitar objek tersebut, baik masyarakat setempat sebagai objek yang terlibat secara tidak langsung dalam pengembangan objek tersebut.

Pola tata ruang dalam kegiatan pariwisata berupa struktur tata ruang kawasan pariwisata dalam konteks kaitan waktu dan ruang. Terdapat 4 elemen dasar tata ruang kegiatan pariwisata, yaitu:

- a. Daerah Tujuan Wisata (Resort)
- b. Jaringan Transportasi (Transportation Network)
- c. Perilaku Wisatawan (The Behavior of Tourist)
- d. Kebijakan Pemerintah dalam Kepariwisata

Keempat elemen dasar ini saling terkait satu sama lain. Kerangka umum mengacu pada beberapa unsur (elemen) yang dinamis, pada beberapa konteks ruang dan waktu. Secara garis besar terdapat 6 kajian pokok yang berkaitan dengan struktur tata ruang pariwisata yaitu:

- a. Studi pola spasial dari supply

- b. Studi pola spasial dari demand
- c. Studi lokasi daerah tujuan wisata
- d. Studi pergerakan dan arus wisatawan
- e. Studi dampak pariwisata
- f. Studi model/tipe ruangan kawasan wisata

Tata ruang pariwisata dalam pengembangannya akan mengalami perubahan-perubahan, di mana perubahan tersebut merupakan perumusan keinginan yang lingkupnya lebih luas/makro dengan perancangan sebagai produk perumusannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan faktor-faktor fisik yang mempengaruhi dalam pengembangan suatu kawasan wisata meliputi:

- a. Sumber air (water, waterlife), tersedia cukup air yang memiliki kualitas baik, dan memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan.
- b. Vegetasi (vegetasi cover, withlife), variasi tumbuhan tidak hanya menjadikan suatu bentang alam yang indah, juga dapat menjadi tempat yang nyaman bagi makhluk hidup, perlindungan hewan, dan lainnya.
- c. Iklim (climate and weather), iklim dan cuaca seperti hujan, musim, arah angin dan sinar matahari dalam suatu wilayah turut mempengaruhi aktivitas wisata yang ada.
- d. Topografi (topography), variasi topografi wilayah dari bergunung-gunung / bergelombang sampai daratan, beberapa koridor

sungai yang ada, merupakan suatu variasi yang menarik dari relief suatu kawasan.

- e. Sejarah (history, ethnicity and legend), latar belakang suatu daerah yang merupakan khasanah suatu daerah.
- f. Estetika (esthetics), keindahan bentang alam merupakan suatu hal yang bersaing antara satu daerah yang ada dalam suatu pasar yang dominan.
- g. Kelembagaan dan daya tarik (institution and attraction), mengembangkan sistem daya tarik perkembangan fisik kawasan dengan keberadaan lembaga tertentu atau hal menarik lainnya yang beragam dan dipertimbangkan, dan mampu menarik perkembangan aktivitas lainnya.
- h. Luas kawasan (urban kompleks), kawasan yang luas akan memiliki kelengkapan yang beragam sesuai dengan kebutuhan, sedangkan kawasan yang ukurannya kecil akan lebih dibatasi perkembangannya dan akan menyesuaikan fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi keberadaannya terhadap struktur pelayanan yang lebih luas.
- i. Transportasi (transportations), perkembangan kawasan dipengaruhi oleh lingkungan baik antara kawasan dengan pusat-pusat pelayanan, perpindahan moda dan kawasan yang lebih luas melalui ketersediaan jaringan dan moda transportasi yang baik.

Dengan melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata tersebut di atas, maka faktor tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan objek wisata Pantai Palippis ke depan.

2.13 Konsep Pengembangan Objek Wisata

Konsep pengembangan objek wisata yang potensial, secara umum mengacu pada konsep pengembangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan pembangunan fisik tetap mengacu pada azas pemanfaatan dan mengikuti kaidah-kaidah pelestarian alam secara menyeluruh.
- b. Lokasi yang akan dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik lokasi dan mempunyai daya tarik yang spesifik.
- c. Kegiatan atraksi wisata yang dikembangkan pada kawasan wisata, harus tetap memperhatikan tata nilai lingkungan setempat.
- d. Pemanfaatan lahan harus tetap memperhatikan faktor nilai, keadaan, fisik, sosial budaya dan karakteristik alam setempat.
- e. Pembangunan dan pengembangan objek wisata harus memperhatikan karakteristik fisik dan karakteristik pengunjung.
- f. Memanfaatkan ungkapan fisik lingkungan alami dan lingkungan buatan setempat, baik itu batuan fisiknya, ragam rias arsitektur,

pola perkampungan maupun nilai filosofi yang terkandung di dalamnya.

- g. Keselarasan harmonis antara aktivitas penduduk dan masyarakat setempat dan kegiatan fisik yang dikembangkan, baik aspek fisik maupun non fisik.
- h. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan baik sosial, budaya, dan fisik lingkungan. Memanfaatkan seoptimal mungkin bahan, teknologi dan tenaga kerja lokal.

2.14 Kebijakan Pengembangan Wilayah Pesisir

a. Peraturan Perundang-Undangan

Pembangunan sektor kelautan tidak dapat dilepaskan dari makna Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pokok Perairan Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982. Dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan konsep Wawasan Nusantara yang menjadi dasar bagi penetapan batas wilayah perairan Nasional Indonesia. Undang-Undang ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, serta lautan yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara tersebut, laut wilayah Indonesia adalah laut teritorial selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur dari garis pangkal

yang menghubungkan titik-titik pangkal terluar dari pulau terluar di wilayah Kepulauan Indonesia.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen, ditetapkan pula kewenangan untuk mengelola wilayah dasar perairan beserta segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sampai kedalaman 200 meter dari permukaan laut.

Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Indonesia menetapkan kedaulatannya untuk mengelola perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perairan ZEE adalah jalur laut yang berbatasan dengan jalur laut wilayah Indonesia dengan batas terluar adalah 200 mil laut, diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Negara mempunyai hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati yang terkandung di dalamnya. Namun jika Indonesia tidak mampu memanfaatkannya, maka negara lain berhak memanfaatkan sampai batas ambang lestari dan izin yang diberikan.

b. Lembaga Pengelola Kawasan Pesisir

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999, memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya daerahnya. Pasal 3 dan 10 Undang-Undang ini menyatakan wilayah Daerah Propinsi terdiri atas

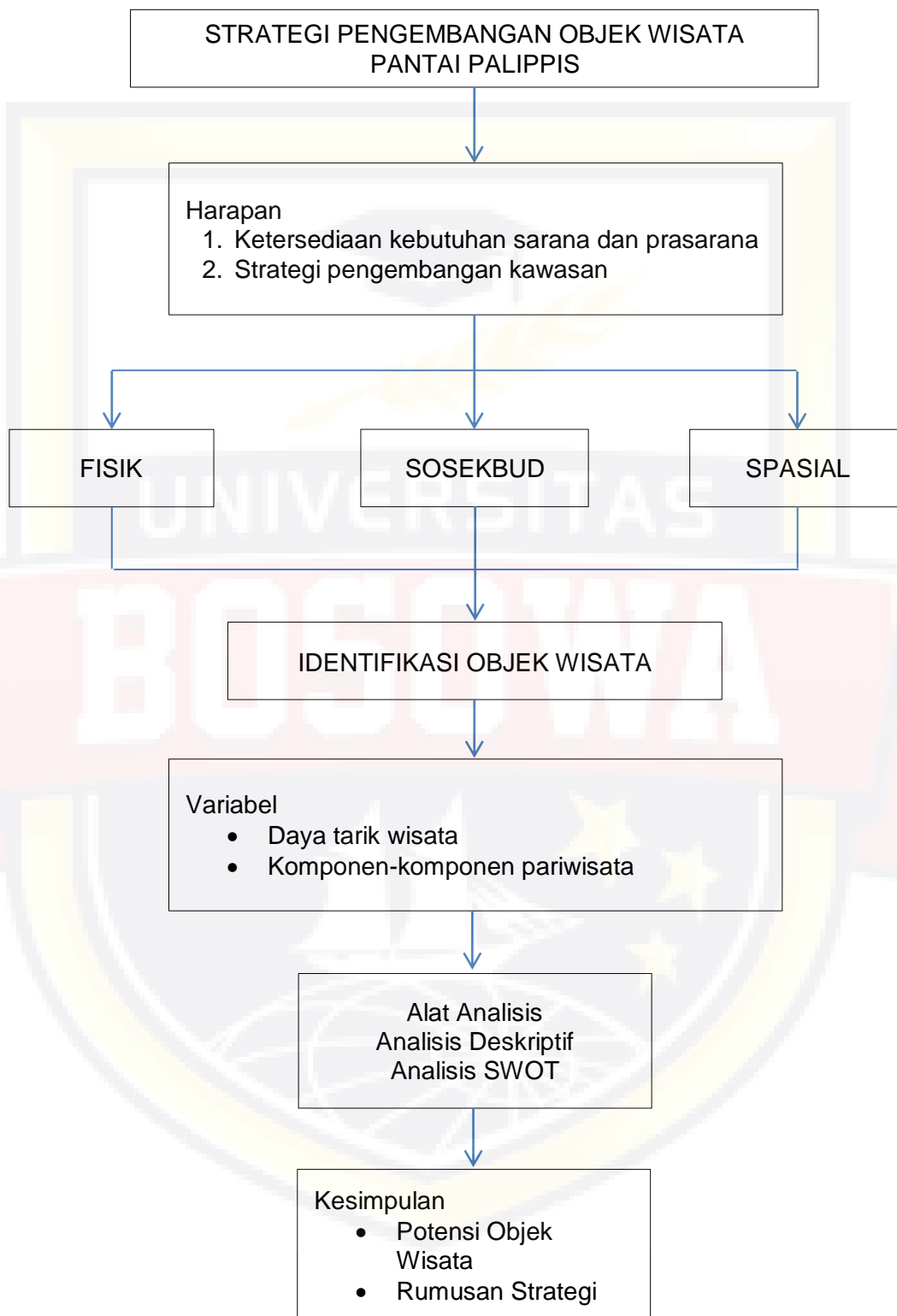
wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut dan wilayah daerah kabupaten / kota adalah sejauh sepertiga dari wilayah laut daerah provinsi. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah di wilayah laut meliputi:

- Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
- Pengaturan kepentingan administratif;
- Pengaturan tata ruang;
- Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan
- Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan suatu yuridiksi (kewenangan pengelolaan), bukan merupakan kedaulatan (sovereignty) dan juga bukanlah kepemilikan (property).

2.15 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian mengenai Studi Pengembangan Objek Wisata Pantai Palippis di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dilandasi oleh kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Bagan Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada objek wisata Pantai Palippis di Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian, mulai dari melakukan usulan penelitian, kegiatan survey lapangan, pembuatan proposal, kegiatan penelitian, pengumpulan data penelitian, sampai dengan perampungan hasil penelitian dan proses kegiatan penyelesaian penelitian yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan persiapan dan pengumpulan data, 1 bulan pembuatan hasil penelitian dan 2 bulan proses kegiatan penyelesaian studi. Jumlah waktu yang digunakan selama 5 bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan

data sekunder diperoleh dan dihimpun dari berbagai data/laporan instansi yang terkait dan juga buku-buku referensi/literatur serta sumber-sumber yang relevan, informasi mengenai kawasan objek wisata Pantai Palippis di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk keperluan penelitian ini dibutuhkan:

1. Data Sekunder

- a. Data dan informasi perkembangan Kabupaten Polewali Mandar yang berkaitan dengan pariwisata dan aspek penunjang pariwisata. Data tersebut didapat dari buku-buku sejarah, hasil penelitian yang berkaitan, Kabupaten Dalam Angka, Analisis Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Polewali Mandar. Data tersebut berupa:
 - 1) Peta dasar dan peta orientasi lokasi penelitian
 - 2) Peta topografi, peta pemanfaatan ruang, peta persebaran fasilitas pendukung, peta sebaran sarana dan prasarana, peta jaringan infrastruktur.
- b. Data yang berhubungan dengan tingkat perkembangan pariwisata mengenai:
 - 1) Kondisi sosial budaya untuk mengetahui perkembangan penduduk, tingkat pendidikan dan kebudayaan.
 - 2) Kondisi daya tarik/atraksi, aksesibilitas, akomodasi, infrastruktur, fasilitas pendukung, pengelolaan,

kelembagaan dan sumber daya manusia serta wisatawan/pengunjung.

- 3) Kondisi kepariwisataan untuk mengetahui pangsa pasar wisata baik dari supply (jenis kegiatan pariwisata yang dikembangkan, atraksi wisata yang telah ada) maupun demand (wisatawan nusantara dan mancanegara).

2. Data Primer

- a. Inventarisasi sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia.
- b. Wawancara langsung dengan wisatawan.
- c. Wawancara langsung dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan objek wisata Pantai Palippis.
- d. Tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan objek wisata Pantai Palippis dalam hal peningkatan kesejahteraan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang ditujukan terhadap objek yang langsung menjadi sasaran penelitian, gunanya untuk memahami kondisi dan potensi objek yang dapat dikembangkan (data primer).

2. Interview / Wawancara

Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap beberapa orang dan pengunjung yang dianggap layak dapat memberikan informasi.

a. Pendataan Institusi

Mengumpulkan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif objek penelitian.

b. Telaah Pustaka

Peneliti mempelajari data, baik data kualitatif maupun data kuantitatif melalui sumber dokumen (laporan, monografi daerah, buku-buku dan lainnya).

3.4 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian maka beberapa alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode yang bersifat deskriptif yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggambarkan atau menguraikan secara jelas kondisi yang terjadi dan digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik variabel yang telah ditetapkan.

2. Metode Analisis SWOT

Merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam lingkungan internal dan eksternal ini pada dasarnya terdapat 4 unsur yang selalu ditemukan, yaitu secara internal memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan (strengths) dan kelemahan-kelemahan (weaknesses), dan secara eksternal akan berhadapan dengan berbagai peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats). Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang antara lain:

- Kekuatan (strengths) adalah faktor internal sebagai aset pendorong untuk mencapai tujuan pengembangan objek wisata Pantai Palippis.
- Kelemahan (weaknesses) yaitu mengidentifikasi faktor internal yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan objek wisata Pantai Palippis.
- Peluang (opportunities) adalah faktor eksternal yang mendukung untuk mencapai tujuan pengembangan objek wisata Pantai Palippis.
- Ancaman (threats) adalah mengidentifikasi faktor eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan pengembangan objek wisata Pantai Palippis.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar

4.1.1 Arah Kebijakan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dijabarkan dalam program penataan wilayah melalui program-program pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang, dalam rangka pencapaian sasaran dan pelaksanaan ditempuh dengan beberapa kebijaksanaan program meliputi :

- a. Program penataan dan pengendalian ruang;
- b. Peningkatan pembangunan desa dan daerah terpencil;
- c. Program pembangunan perkotaan;
- d. Program pengembangan perumahan dan prasarana serta sarana permukiman;
- e. Program pengembangan daerah perbatasan;
- f. Program pengelolaan pertanahan.

4.1.2 Program-Program Pembangunan

Guna pencapaian pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Polewali Mandar, maka upaya-upaya yang ditempuh adalah :

- a. Program penataan dan pengendalian ruang;

- b. Program pembangunan dan pengendalian ruang;
- c. Program perencanaan pengendalian bencana alam.

4.1.3 Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Dalam rencana strategis dirumuskan arah kebijakan dan program-program strategis pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :

Arah Kebijakan

- Pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Peningkatan peran serta aparat dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Pelestarian fungsi dan kemampuan sumber daya lingkungan hidup.
- Peningkatan peran serta aparat, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan.
- Peningkatan pengendalian kerusakan lingkungan laut dan pantai.
- Peningkatan peran serta aparat dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pantai.

Program Pembangunan

- Inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

- Pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- Pembinaan daerah pantai.
- Peningkatan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup.

4.2 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Polewali Mandar

4.2.1 Karakteristik Fisik Wilayah

a. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salahsatu Kabupaten yang berada di Sulawesi Barat yang berjarak ± 197 Km dari ibukota propinsi dan terletak paling Selatan Propinsi Sulawesi Barat. Dengan luas wilayah administrasi Kabupaten Polewali Mandar ± 2002,30 Km² yang dibagi dalam 16 Kecamatan yaitu Tubbi Taramanu, Allu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Tapango, Bulu, Matakali, Polewali, Binuang, Anreapi dan Matangnga.

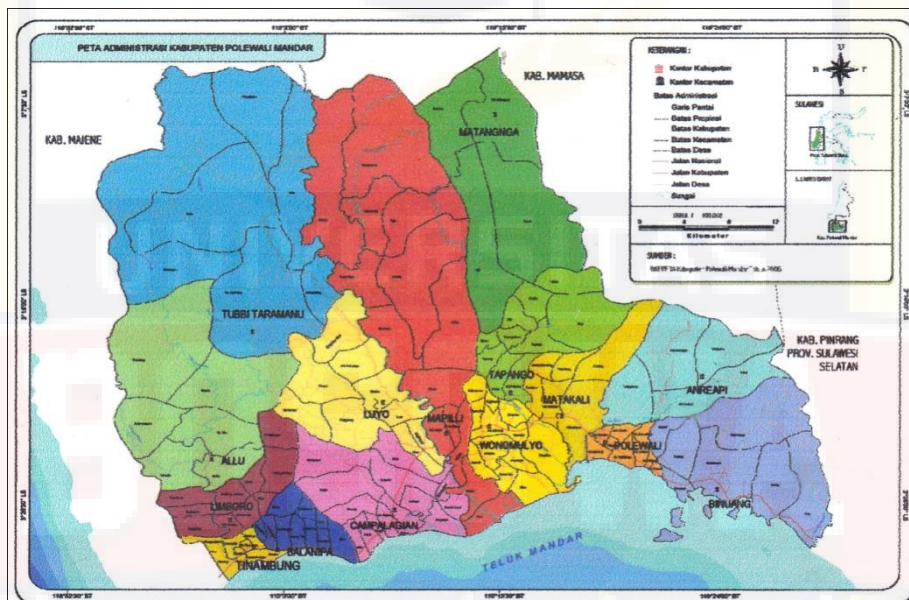
Letak geografis Kabupaten Polewali Mandar berada pada titik koordinat 2⁰40'00" – 3⁰32'00" LS dan 118⁰40'27" – 119⁰32'27" BT. Adapun batas administrasi Kabupaten Polewali Mandar adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar



b. Topografi

Wilayah Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari kondisi topografi yang ada di mana sebagian besar wilayahnya (> 78% dari luas Kabupaten) memiliki topografi bergunung, dengan kelas lereng dominan 41% - 60% dan >60%. Sisanya didominasi oleh topografi datar dengan kelas lereng <2%, yang luasnya 38.300 Ha, atau sama dengan 18,50% dari total wilayah kabupaten. Untuk lebih

jelasan mengenai kondisi topografi Kabupaten Polewali
Mandar sebagai mana pada **Tabel 1** dan **Gambar 2**.

Tabel 1. Luas Lahan, Kelas Topografi dan Kelas Lereng

Topografi	Kelas Lereng (%)	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
Datar	< 2	38.200	18,50
Landai	2 – 8	662	0,32
Bergelombang	9 – 15	3.120	1,51
Berbukit	16 – 25	1.897	0,92
Bergunung	41 – 60	100.010	48,42
Bergunung Curam	> 60	62.683	30,33

Sumber : Kantor BAPPEDA Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 2. Peta Topografi



c. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Polewali Mandar sangat berkaitan dengan tipe iklim yang ada. Keberadaan air tanah dangkal berkisar 4 meter dan air tanah dalam berkisar 15 – 35 meter. Kondisi hidrologi permukaan juga ditentukan oleh sungai-sungai yang ada sebanyak 73 sungai. Sungai terbesar adalah Sungai Tinambung dan Sungai Mapilli memiliki debit air yang relatif besar yang berhulu di pegunungan dan bermuara di Teluk Mandar. Air limpasan hujan biasanya mengalir ke arah Barat dan sebagian membentuk genangan.

d. Iklim

Kabupaten Polewali Mandar memiliki iklim tropis, dengan suhu berkisar $24,56^{\circ}\text{C}$ hingga $30,59^{\circ}\text{C}$ dan temperatur rata-rata $27,20^{\circ}\text{C}$, serta hari hujan berkisar antara 11,38 -11,67 hari dan curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 159,6 – 165,5 mm (relatif basah). Musim hujan berawal pada bulan September hingga bulan Mei. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel2.
Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	132,8	23
Februari	61,5	18
Maret	224,1	19
April	161,7	19
Mei	246,7	15
Juni	27,8	7
Juli	20,2	8
Agustus	1,9	2
September	66,7	6
Oktober	7,3	6
November	135,2	13
Desember	134,5	19
Rata-rata 2007	159,70	11,38

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Polewali Mandar 2008

e. Vegetasi

Kondisi vegetasi di Kabupaten Polewali Mandar sangat beragam, karena letak wilayah berada pada daerah pesisir pantai dan daerah pegunungan. Untuk vegetasi yang berada di sekitar wilayah pantai pada umumnya berupa pohon kelapa dan pohon bakau. Sedangkan pada

wilayah pegunungan berupa cengkeh, kakao, pohon pinus dan jenis vegetasi lainnya. (**sumber : kantor BPS**

Kabupaten Polewali Mandar)

4.2.2 Kondisi Sosial Budaya

Adat istiadat dan pola kebiasaan penduduk Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari sikap atau pola tingkah laku kebanyakan suku Bugis di Pulau Sulawesi walaupun suku asli penduduk Kabupaten Polewali Mandar adalah suku Mandar, yang diwujudkan dengan adanya saling tolong menolong.

Ditinjau dari bahasa sehari-hari pada umumnya penduduk Kabupaten Polewali Mandar menggunakan bahasa Mandar dan Bugis, selebihnya adalah Bahasa Indonesia.

Watak dan sikap kalangan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar masih terlalu erat kaitannya dengan adat istiadat berupa pesta perkawinan, pesta hari-hari besar agama dan pesta pada musim panen.

4.2.3 Sistem Transportasi

Transportasi darat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar memiliki peranan yang sangat strategis dalam membantu aktivitas masyarakat. Jalan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar diklasifikasikan dalam dua kategori yakni jalan Propinsi yang panjangnya 130.558 Km dan jalan

Kabupaten dengan panjang 579,78 Km yang dibagi dalam 3 kelas jalan. Untuk kondisi jalan yang ada di setiap objek wisata pada umumnya merupakan jalan pengerasan, jalan aspal dan jalan tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 3.**

Tabel3.
Fungsi dan Permukaan Jalan di Kabupaten Polewali Mandar

No	Permukaan Jalan	Panjang Jalan Km (Tahun)		
		2005	2006	2007
1	Aspal	243,80	243,80	243,80
2	Pengerasan	80,60	80,60	80,60
3	Tanah	181,06	181,06	181,06
No	Fungsi Jalan	2005	2006	2007
1	Arteri	17,60	17,60	17,60
2	Kolektor	12,50	12,50	12,50
3	Lokal	110,50	110,50	110,50

Sumber : Dinas PU Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008

4.2.4 Sektor Kepariwisataaan

Berdasarkan hasil perolehan data, untuk pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat memanfaatkan promosi wisata dalam hal pengembangan potensi wisata yang ada, dalam rangka kunjungan wisata domestik maupun mancanegara.

Adapun jenis wisata yang terdapat di Kabupaten Polewali Mandar adalah :

a. Jenis Wisata Tirta / Bahari

Kabupaten Polewali Mandar yang wilayahnya sebagian berbatasan dengan garis pantai Teluk Mandar

sehingga dapat dijumpai beberapa objek wisata tirta yang cukup berpotensi untuk dikembangkan. Adapun jenis objek wisata yang terdapat di Kabupaten Polewali Mandar meliputi : Pantai Sappoang, Pantai Labuang, Pantai Palippis, Pantai Mampie dan Pantai Bahari. Objek wisata tirta yang ada di Kabupaten Polewali Mandar lebih cenderung mengarah kepada objek wisata pantai dengan karakteristik kondisi pantai pasir putih.

b. Jenis Wisata Alam

Selain jenis wisata bahari juga terdapat jenis wisata alam di Kabupaten Polewali Mandar yang terbentuk secara alamiah diakibatkan oleh proses alam yang berlangsung, seperti pada kawasan wisata Limbong.

c. Jenis Agrowisata

Kondisi geografis Kabupaten Polewali Mandar yang sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian dan perkebunan, sehingga selain wisata alam dan wisata tirta dapat dijumpai wisata agro yang karakteristik wisatanya lebih mengarah kepada hasil alam seperti kebun durian, rambutan, langsung dan mangga, yang terdapat hampir di semua wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Begitupun dengan tanaman perkebunan seperti : cengkeh, coklat,

kelapa dan lain-lain yang juga penyebarannya hampir di seluruh Kabupaten Polewali Mandar.

d. Jenis Wisata Budaya dan Sejarah

Wisata budaya dan sejarah dapat dijumpai juga di Kabupaten Polewali Mandar yang sangat berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Adapun karakteristik objek wisata budaya berupa peninggalan “Monumen Korban 40.000 Jiwa” yaitu di Kecamatan Limboro, serta kebiasaan masyarakat berupa adat istiadat yang unik seperti tarian untuk menyambut tamu-tamu penting, pesta nelayan yang dilakukan ketika para nelayan mulai melaut, pesta panen sawah, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

e. Makanan Tradisional

Makanan tradisional yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, seperti : jepa yang terbuat dari singkong (ubi kayu); baje yang terbuat dari ketan, kelapa dan aren; loka anjoroi (pisang santan); dan lain-lain.

4.3 Tinjauan Umum Wilayah Kecamatan Balanipa

4.3.1 Wilayah Administrasi

Kecamatan Balanipa merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Polewali Mandar yang terletak

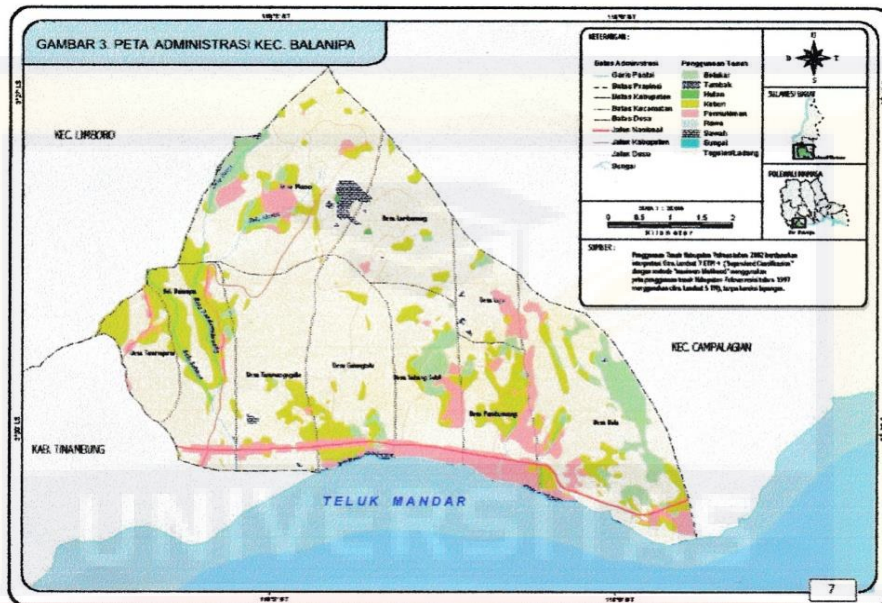
± 30 Km dari ibukota Kabupaten. Kecamatan Balanipa merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Tinambung sebagai wilayah induk. Luas wilayah Kecamatan Balanipa mencapai 37,42 km² yang terbagi dalam 10 desa/kelurahan yakni Balanipa, Tammangalle, Sabangsubik, Pambusuang, Mosso, Galungtulu, Bala, Tammajarra, Lambanan dan Lego. Adapun batas-batas administrasinya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Limboro.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Campalagian.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tinambung.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3**.

Kecamatan Balanipa sebagian daerahnya berbukit, dan berada pada ketinggian 0 – 500 meter dari permukaan laut.

Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Balanipa



4.3.2 Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah/daerah. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai jumlah dan perkembangan penduduk di Kecamatan Balanipa.

a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kecamatan Balanipa pada tahun 2004-2008 mengalami peningkatan. Adapun data perkembangan penduduk dapat dilihat pada **Tabel 4** sebagai berikut :

Tabel 4.
Jumlah dan Perkembangan Penduduk
Kecamatan Balanipa Tahun 2008

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (jiwa)
1	2004	55.137	-
2	2005	60.768	7.631
3	2006	58.481	2.287
4	2007	59.603	1.122
5	2008	25.326	-
Jumlah			

Sumber : Kantor Kecamatan Balanipa 2008

b. Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang paling tinggi terdapat di Desa Pambusuang sebanyak 1.016 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil terdapat di Desa Lambanan sebanyak 535 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 5** di bawah ini.

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Balanipa Tahun 2008

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk
1	Balanipa	585	2.617
2	Tammangalle	430	2.085
3	Sabangsubik	479	3.041
4	Pambusuang	1061	5.239
5	Mosso	336	1.158
6	Galungtulu	631	3.112
7	Bala	858	3.958
8	Tammajarra	328	1.791
9	Lambanan	108	535
10	Lego	220	1.795
Jumlah		4.991	25.326

Sumber : Kantor Kecamatan Balanipa 2008

4.4 Tinjauan Khusus Objek Wisata Pantai Palippis

4.4.1 Kondisi Fisik Kawasan

a. Letak Geografis

Kecamatan Balanipa terdiri dari 10 Desa/Kelurahan yang mana Desa Bala (memiliki 4 Dusun) adalah salah satu daerah penelitian dengan orientasi penelitian pada objek wisata Pantai Palippis.

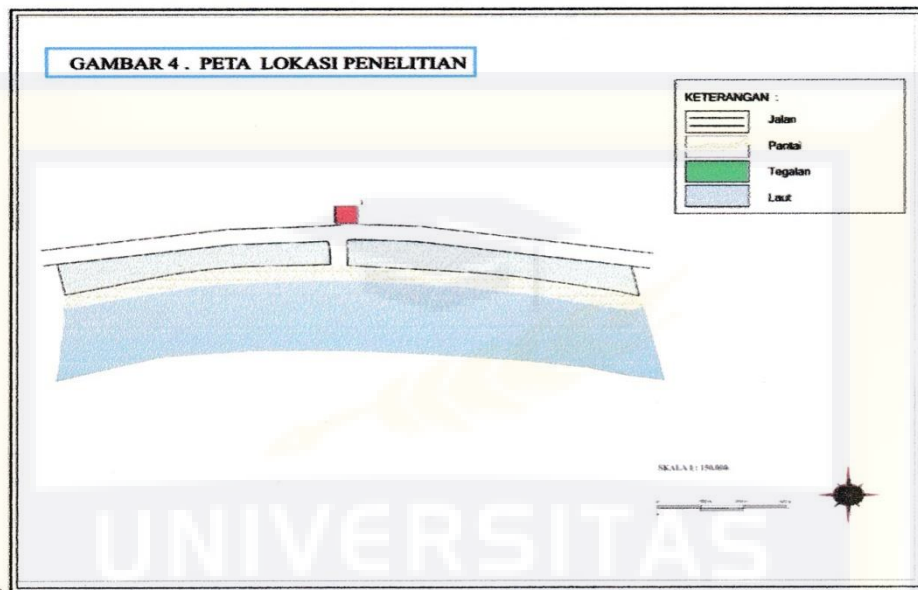
Secara geografis objek wisata Pantai Palippis masuk dalam administrasi Desa Bala dengan jarak tempuh ke ibukota kecamatan \pm 2 Km dan berada pada lokasi yang strategis karena merupakan daerah yang mudah dijangkau oleh sarana transportasi.

Adapun batas-batas wilayah administrasinya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lego.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Campalagian.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pambusuang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4**.

Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian



b. Topografi

Kondisi topografi pada objek wisata Pantai Palippis merupakan daerah perbukitan, batu karang dengan tebing dan goa alam. Di sepanjang garis pantai \pm 3 Km terdapat tebing karang yang menyerupai ngarai dengan hamparan pasir putih yang membentang luas.

Adapun kemiringan lereng Desa Bala berkisar antara 8 – 15 % yang dikategorikan sebagai lahan yang datar hingga landai.

Adapun kisaran lerengnya dapat dilihat pada **Tabel 6** sebagai berikut :

Tabel6.
Kelas Lereng dan Bentuk Objek Wisata Pantai Palippis

No	Kelas Lereng (%)	Bentuk Wilayah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 8	Datar	0,81	45,76
2	8 – 15	Landai	0,96	54,23
Jumlah			1,77	100

Sumber : Kantor Kecamatan Balanipa 2008

c. Geologi

Aspek geologi selalu dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan suatu wilayah misalnya pengembangan daerah, dengan pembangunan jalan, pemukiman, bendungan selalu menghindari daerah yang berstruktur kasar, kekar, struktur yang miring dengan lapisan yang kedap air dan yang tidak kedap air.

Struktur geologi tanah di daerah kawasan studi objek wisata Pantai Palippis akan dilihat dalam perspektif geologi regional wilayah Kabupaten Polewali Mandar di mana sangat spesifik karena merupakan pertemuan dua gugusan benua yaitu Asia dan Australia dengan karakteristik geologis merupakan satu kesatuan yang terdiri atas jenis tanah merah dan endapan pasir dan sebagian jenis batuan sedimen.

d. Hidrologi

Air merupakan kebutuhan pokok yang harus ada dalam kehidupan manusia, di samping itu juga dapat difungsikan sebagai faktor penunjang bagi pengembangan kawasan.

Objek wisata Pantai Palippis yang keberadaannya sangat berkaitan erat dengan masalah air, maka kondisi hidrologinya akan ditinjau berdasarkan sumber air yang ada. Keberadaan sumber air di objek wisata Pantai Palippis umumnya berasal dari air tanah dangkal dengan kedalaman 4 meter dan air tanah dalam berkisar antara 15 – 35 meter. Adapun sumber air permukaan diperoleh dari aliran sungai-sungai besar.

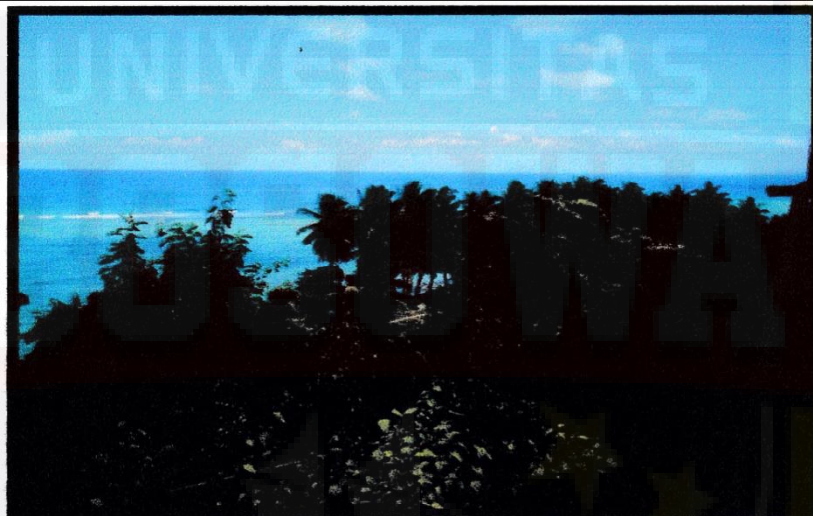
e. Iklim

Kondisi iklim di wilayah Desa Bala sama dengan wilayah Kecamatan Balanipa pada umumnya. Kawasan studi mengalami dua kali perubahan musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ditinjau dari kondisi iklim di objek wisata Pantai Palippis di mana bulan basah jatuh pada bulan Oktober – Maret dan bulan kering jatuh pada bulan April – September.

f. Vegetasi

Jenis vegetasi yang terdapat pada objek wisata Pantai Palippis merupakan vegetasi campuran berupa tanaman bakau, pohon kelapa dan jenis tanaman yang lain. Untuk lebih jelasnya diperlihatkan pada **Gambar 5**.

Gambar 5. Vegetasi Pada Lokasi Penelitian



4.4.2 Pola Penggunaan Lahan

Luas wilayah atau kawasan sekitar tepian Pantai Palippis adalah 2,2 Ha dengan pola pemanfaatan ruang kawasan yang telah berkembang. Penggunaan lahan pada daerah kawasan studi didominasi oleh perkebunan (kebun campuran) dengan luas 1091 m², sedangkan lahan yang paling sedikit adalah lahan permukiman. Secara umum pola pemanfaatan lahan

pada objek wisata Pantai Palippis dapat dilihat pada **Tabel 7** sebagai berikut:

Tabel 7.
Luas Objek Wisata Pantai Palippis
Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2008

No	Penggunaan Lahan	Luas (m ²)	Persentase (%)
1	Pemukiman	4.630	20,86
2	Kebun Campuran	10.910	49,14
3	Pertambakan	3.930	17,70
4	Sarana Olah Raga	750	3,38
Jumlah		22.200	100

Sumber : Kantor Kelurahan Bala, 2008

4.4.3 Aksesibilitas

Dalam mendukung pengembangan kawasan dalam hal ini kawasan wisata/rekreasi, maka faktor daya jangkau dalam mempermudah pergerakan untuk mencapai kawasan tersebut (aksesibilitas) juga sangat berpengaruh. Di mana aksesibilitas yang perlu diperhatikan adalah lokasi kawasan tersebut dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah.

Dari segi aksesibilitas, lokasi objek wisata Pantai Palippis dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah karena lokasi tersebut ditunjang dengan keberadaan jalan Propinsi. Sedangkan jarak yang ditempuh jika menggunakan angkutan umum adalah:

- Dari ibukota Kecamatan Balanipa dengan jarak kurang lebih 2 Km.
- Dari ibukota Kabupaten dengan jarak kurang lebih 20 Km.

4.4.4 Keadaan Fasilitas Sosial Ekonomi dan Utilitas Kawasan

a. Keadaan Fasilitas Sosial Ekonomi

Keadaan fasilitas sosial ekonomi kawasan objek wisata Pantai Palippis yang telah berkembang dan telah dimanfaatkan saat ini belum menunjukkan tingkat kegiatan yang cukup berarti, hal ini disebabkan karena aktifitas yang berkembang dalam kawasan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana ekonomi untuk mendukung keberadaan kawasan. Aktifitas ekonomi yang telah berkembang masih bersifat skala pelayanan unit lingkungan.

Penyebaran fasilitas di kawasan wisata Pantai Palippis terdiri dari fasilitas permukiman penduduk, fasilitas pemerintahan yaitu sebuah Kantor Lurah serta fasilitas perdagangan dan peribadatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 8** sebagai berikut:

Tabel 8.
Jumlah Fasilitas Pendukung Objek Wisata Pantai Palippis

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)
1	Fasilitas Permukiman	3.547
2	Fasilitas Perkantoran	3
3	Fasilitas Peribadatan	5
4	Fasilitas Kesehatan	1
5	Fasilitas Perdagangan	2
6	Fasilitas Pendidikan	7
Jumlah		3.565

Sumber : Kantor Kelurahan Bala Tahun 2008

Gambar 6. Fasilitas Pendukung Objek Wisata



b. Utilitas Kawasan

Sistem utilitas yang telah berfungsi saat ini di lokasi studi sepenuhnya belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk mengetahui pemenuhan akan sistem jaringan utilitas di kawasan objek wisata Pantai Palippis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jaringan Air Bersih

Keadaan jaringan air bersih pada lokasi penelitian berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa pada saat ini belum dijangkau oleh pelayanan air bersih dari PDAM.

2) Jaringan Drainase

Kondisi jaringan drainase di wilayah studi berdasarkan hasil pengamatan di lapangan belum berfungsi dengan baik dan hingga saat ini belum dilakukan pembangunan jaringan secara permanen mengingat aktivitas kawasan wisata Pantai Palippis belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Kondisi jaringan drainase masih temporer atau alamiah (tanah), sedangkan sistem jaringan primer yang ada berupa sungai.

3) Jaringan Listrik

Pola jaringan listrik pada lokasi penelitian secara keseluruhan telah terdistribusi dengan baik. Untuk klasifikasi sistem sambungan terbagi atas 2 bagian yaitu:

➤ Jaringan Listrik Tegangan Menengah

Berfungsi untuk menyalurkan sistem sambungan unit komponen bangunan.

➤ Jaringan Listrik Tegangan Rendah

Merupakan sistem sambungan yang telah terpasang pada unit-unit perumahan dan beberapa fasilitas yang terdapat pada wilayah studi.

4) Jaringan Jalan

Kondisi jaringan jalan pada lokasi penelitian hingga saat ini sudah berkembang dengan baik terutama di sekitar Pantai Palippis. Hasil identifikasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan kondisi jaringan jalan yang terdapat pada lokasi penelitian diklasifikasikan ke dalam 3 jenis permukaan yaitu: jalan aspal, jalan pengerasan dan jalan tanah.

4.4.5 Perkembangan Jumlah Pengunjung

Perkembangan jumlah pengunjung pada objek wisata Pantai Palippis setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2007 mengalami penurunan, di mana jumlah pengunjung pada tahun 2004 sebanyak 642 jiwa dan pada tahun 2007 menjadi 417 jiwa, sehingga persentase peningkatan jumlah pengunjung tiap tahun mencapai 2,1 %.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 9** sebagai berikut:

Tabel 9.
Perkembangan Jumlah Pengunjung Tahun 2008

No	Tahun	Jumlah Pengunjung		Jumlah	Pertambahan	Persentase (%)
		Lokal	Asing			
1	2003	642	-	642	-	2.1
2	2004	679	-	679	28	2.2
3	2005	676	-	676	6	2.2
4	2005	625	-	625	-53	-2.0
5	2007	417	-	417	-208	-1.3

Sumber : Data Manual Kunjungan Warga, Kantor Kelurahan Bala Tahun 2008

4.4.6 Potensi Kawasan Wisata Pantai Palippis

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki kawasan wisata Pantai Palippis memiliki daya tarik tersendiri untuk dikembangkan, antara lain objek wisata pantai pasir putih yang juga menawarkan keindahan panorama alam laut yang eksotis. Adapun objek-objek wisata tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikembangkan secara terpadu dengan objek wisata pendukung lainnya yang terdapat di sekitar kawasan untuk dijadikan sebagai satu kesatuan kegiatan pariwisata.

a. Objek Wisata Pantai Palippis

Telah diketahui produk jasa wisata meliputi segala sesuatu yang perlu disajikan kepada pengunjung, mengenai hal yang ditunjukkan baik secara aktual maupun

secara potensial yang dimiliki oleh objek tersebut sehingga keberadaannya memiliki daya tarik bagi pengunjung.

Objek wisata Pantai Palippis dapat dikembangkan sebagai tempat wisata/rekreasi, dengan berbagai potensi yang dimiliki antara lain:

- 1) Luas Kawasan Wisata Pantai Palippis adalah 1,2 Ha.
- 2) Objek Wisata Pantai Palippis yang memiliki keindahan alam yang bernuansa bahari.
- 3) Adanya hamparan pasir putih dengan panjang kurang lebih 3 Km.
- 4) Ombak laut.
- 5) Potensi hasil laut memiliki sumber daya yang dapat dijadikan mata pencaharian bagi masyarakat setempat.

Adapun aktifitas yang dapat dilakukan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Palippis antara lain:

- 1) Untuk tempat mandi-mandi.
- 2) Untuk menikmati keindahan alam.
- 3) Sebagai tempat olah raga pantai.
- 4) Untuk menikmati masakan hasil laut.

Objek wisata Pantai Palippis memiliki estetika wisata pantai seperti: adanya suasana ombak, air laut yang jernih, terdapat batu-batu cadas di pinggiran pantai yang memiliki

tekstur yang indah, adanya pepohonan yang menjadi tempat pelindung dan lain-lain.

Gambar 7. Objek Wisata Palippis



b. Objek Wisata Budaya

Adapun jenis objek wisata budaya di Desa Bala masih bersifat alami dan hanya berlangsung pada waktu-waktu tertentu yaitu berupa pesta nelayan, peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW yang melibatkan banyak masyarakat. Jenis objek wisata budaya yang dapat dijadikan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk daya tarik kesenian adalah masih berhubungan dengan upacara adat yang dapat digali kembali.

c. Jenis Wisata

1) Wisata Alam

Jenis wisata ini meliputi objek wisata Pantai Palippis.

2) Agrowisata

Jenis agrowisata yang terdapat di wilayah studi adalah sebagai berikut:

- Pertanian berupa persawahan dan tambak
- Tanaman perkebunan rakyat adalah: rambutan, langsung, dan lain-lain.



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Kedudukan Regional

Berdasarkan letaknya, Kabupaten Polewali Mandar berada pada ujung Barat Pulau Sulawesi, sehingga mempunyai arti yang penting dalam interaksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Peran yang nyata dengan keadaan ini telah dijalankan oleh Kota Polewali, sebagai salah satu pusat pelayanan regional khususnya pada aspek sosial dan ekonomi.

Dengan dukungan kondisi jalan negara yang relatif baik akan membantu kelancaran arus pergerakan orang atau barang antar kabupaten. Keberadaan jalan negara tersebut akan lebih meningkatkan peran Kota Polewali dalam mendukung pergerakan antar wilayah, baik dengan kota-kota yang berada dalam lingkup Propinsi Sulawesi Barat maupun dengan kota-kota di luar Sulawesi Barat. Potensi interaksi ini dapat ditingkatkan melalui kegiatan kepariwisataan, sehingga upaya pengembangan terhadap objek-objek wisata yang ada sangat perlu dilakukan. Di samping itu pengembangan terhadap prasarana transportasi laut juga sangat strategis, mengingat letak wilayah yang berada di pesisir sehingga kegiatan pariwisata akan tumbuh dan berkembang dengan cepat.

Dengan kelengkapan fasilitas pelayanan, maka menjadikan Kota Polewali sebagai pintu gerbang bagi pergerakan, khususnya pergerakan wisatawan, yang keluar masuk Sulawesi Barat. Apabila pengembangan pariwisata dilakukan, itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran Kota Polewali sebagai pusat pelayanan regional dalam menjamin pengembangan daerah-daerah di sekitarnya dengan memberdayakan potensi-potensi kepariwisataan yang ada. Harapan akan masuknya wisatawan domestik dan mancanegara untuk memberikan kontribusi lebih bagi Kabupaten Polewali Mandar dalam memainkan perannya sebagai pusat pelayanan regional.

5.2 Analisis Kondisi Fisik Kawasan

Hasil penilaian fisik yang dilakukan menunjukkan objek wisata Pantai Palippis layak untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai kawasan wisata pantai. Karena lokasi kawasan dapat menerima beban pembangunan, serta daya dukung lahan yang tersedia, di samping itu posisi kawasan yang berada di sepanjang garis pantai.

5.3 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi dan jenis tanah pada kawasan perencanaan mempunyai tingkat kemampuan tinggi untuk dapat berkembang sebagai objek wisata. Berdasarkan hasil pembentukannya dipengaruhi oleh struktur pantai dan pegunungan. Hal ini dapat

dilihat dari kondisi geologi yang ada, di mana kondisi geologinya terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu : batuan sedimen dan batuan gamping/cadas, sedangkan jenis tanah termasuk dalam jenis tanah merah dan mediteran coklat. Kondisi tersebut mendukung kawasan untuk menerima kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata.

5.4 Kondisi Topografi

Kondisi topografi Desa Bala merupakan perpaduan antara dataran rendah, perbukitan dan pantai. Dataran rendah merupakan areal persawahan dan pertambakan, dataran tinggi dengan luas kurang lebih 35,98% dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.

Kondisi topografi merupakan hal yang menjelaskan tentang layak dan tidaknya suatu kawasan diperuntukkan sebagai kawasan pengembangan. Di mana aspek topografi terkait dengan ketinggian dan kemiringan lereng yang ada pada lahan tertentu. Berdasarkan perolehan data di mana wilayah Desa Bala yang membawahi objek wisata Pantai Palippis ditinjau dari kondisi topografinya, memiliki kisaran lereng 8 – 15 % yang dikategorikan sebagai lahan yang datar hingga landai. Secara topografis kawasan tersebut layak untuk dikembangkan sebagai lahan peruntukan wisata/rekreasi.

5.5 Kondisi Hidrologi

Sumber air pada kawasan wisata Pantai Palippis yang digunakan oleh penduduk berasal dari sumur galian dengan kedalaman sekitar 4 meter.

Debit air mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sepanjang musim panas terlebih pada musim penghujan. Untuk memenuhi kebutuhan perkebunan pada wilayah studi, masyarakat mengandalkan air sungai dan hujan. Sedangkan kemampuan air bersih yang terdapat di dalam tanah yang kedalamannya berkisar antara 15 – 35 meter lebih disebabkan oleh masih banyaknya pepohonan di sekitar kawasan studi yang masih terjaga kelestariannya sehingga pada musim kemarau masyarakat di sekitar kawasan tidak kekurangan air. Dengan demikian secara hidrologis Kawasan Pantai Palippis memiliki daya dukung lahan yang tinggi bagi pengembangannya sebagai tempat wisata/rekreasi pantai.

5.6 Iklim

Kondisi iklim suatu wilayah sangat mempengaruhi intensitas aktifitas dan pergerakan orang, dalam hal ini terkait dengan aktifitas wisatawan yang akan berkunjung ke Objek Wisata Pantai Palippis. Berdasarkan data yang ada menjelaskan bahwa iklim wilayah Kabupaten Polewali Mandar secara umum sangat normal seperti wilayah lainnya dengan kisaran suhu rata-rata $27,20^{\circ}$ C dan rata-rata

curah hujan berkisar antara 159,6 -165,5 mm. Secara klimatologis kondisi tersebut sangat mendukung berbagai aktifitas termasuk wisata, namun karena merupakan wisata daerah pantai maka perlu antisipasi terhadap bahaya wilayah pesisir seperti badai dan ombak laut.

5.7 Vegetasi

Keadaan vegetasi atau jenis tanaman yang terdapat di lokasi penelitian terdiri dari pohon kelapa dan jenis tanaman perkebunan lainnya. Secara khusus vegetasi kawasan Pantai Palippis yang terdiri dari pohon kelapa dan bakau akan memberikan kesan landscape pantai sehingga mendukung aktifitas rekreasi wisatawan di dalamnya.

5.8 Analisis Pola Penggunaan Lahan Terhadap Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Palippis

Lahan merupakan areal yang berfungsi untuk menampung segala aktifitas pembangunan. Namun terkadang pengembangan suatu lahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang diperuntukkan bagi lahan tersebut, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pengembangan kawasan tersebut.

Dalam usaha mengembangkan suatu kawasan, aspek tata guna lahan juga memegang peranan penting. Seperti halnya dengan

objek wisata Pantai Palippis yang pengembangannya sangat erat kaitannya dengan jenis tata guna lahan yang ada di sekitarnya. Mengingat objek wisata Pantai Palippis, selain memiliki potensi pantai juga terdapat lahan perkebunan yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Berdasarkan data dari Desa Bala tahun 2007, pola penggunaan lahan yang ada di wilayah tersebut meliputi 7 (tujuh) macam tata guna lahan, dan di antara tata guna lahan tersebut hanya terdapat satu jenis guna lahan yakni lahan perkebunan yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai potensi pendukung bagi pengembangan kawasan, khususnya objek wisata Pantai Palippis. Adapun potensi yang dimiliki oleh areal perkebunan / kebun campuran yang dapat mendukung pengembangan kawasan sebagai kawasan wisata / rekreasi berupa tanaman kelapa. Dengan demikian areal perkebunan / kebun campuran merupakan salah satu pendukung bagi pengembangan kawasan sebagai objek wisata, sehingga keberadaannya tetap dipertahankan atau difungsikan dan dikembangkan.

5.9 Aksesibilitas Kawasan Objek Wisata Pantai Palippis

Faktor aksesibilitas dapat menjadi suatu hambatan bagi pengembangan kawasan jika tidak diperhatikan, menyangkut sistem transportasi dan penunjangnya. Di mana aksesibilitas adalah daya

jangkau masyarakat/pengunjung terhadap kawasan dalam arti bahwa tingkat keterjangkauan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah.

Begitupun keberadaan objek wisata Pantai Palippis yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut maupun masyarakat yang ada di luar wilayah Desa Bala.

Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai aksesibilitas khususnya daya jangkau atau jarak tempuh dalam hal transportasi antara Desa Bala yang membawahi objek wisata Pantai Palippis dengan wilayah hinterlandnya.

Sehubungan dengan masalah aksesibilitas, untuk pengunjung yang datang ke objek wisata Pantai Palippis yang berasal dari luar wilayah Desa Bala khususnya kecamatan yang berada dekat dengan objek wisata Pantai Palippis jumlahnya cukup banyak. Dalam arti bahwa pada umumnya pengunjung yang datang ke lokasi tersebut rata-rata pengunjung yang berasal dari wilayah lain. Hal ini dipengaruhi prasarana transportasi yang sangat memadai seperti kondisi jalan (jalan aspal maupun rute angkutan umum yang menjangkau kawasan wisata).

5.10 Analisis Perkembangan Jumlah Arus Wisatawan

Hasil pendataan yang diperoleh dari instansi kecamatan berupa data manual kunjungan warga secara eksplisit menggambarkan

orang yang masuk ke wilayah ini dengan tujuan kekeluargaan maupun rekreasi. Khusus kunjungan rekreasi menunjukkan bahwa perkembangan jumlah arus wisatawan pada kawasan wisata Pantai Palippis hingga saat ini belum berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya sarana penunjang kegiatan pariwisata pada objek wisata.

Wisatawan yang selama ini datang ke lokasi kawasan wisata Pantai Palippis sebagian besar wisatawan lokal yaitu wisatawan di dalam Kabupaten itu sendiri dan Kabupaten yang dekat dari objek wisata Pantai Palippis, sedangkan wisatawan asing belum ada yang datang mengunjungi objek wisata ini.

Objek wisata Pantai Palippis hanya mampu menarik wisatawan lokal saja, jadi kawasan objek wisata Pantai Palippis memerlukan penyediaan fasilitas untuk kegiatan di dalam objek wisata sehingga mampu menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Maka pola pemasaran yang diharapkan meliputi :

- a. Kegiatan promosi
- b. Peningkatan aktifitas kawasan
- c. Penyediaan sarana dan prasarana

Berkaitan dengan ketiga aspek tersebut di atas maka untuk pemasaran pariwisata Pantai Palippis ditujukan untuk menarik jumlah pengunjung yang disesuaikan dengan kapasitas daya tampung ruang kawasan dengan mempertimbangkan pola

pemasaran yang akan datang dengan sasaran kelompok wisatawan asing dan lokal.

Hal-hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan potensi objek wisata Pantai Palippis di masa mendatang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan promosi untuk memperkenalkan objek daya tarik wisata yang ada di Pantai Palippis.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut.
- c. Penyediaan akomodasi bagi wisatawan yang dapat memberikan kesan yang baik agar pengunjung merasa aman dan nyaman.
- d. Tersedianya tenaga pemandu wisata yang memiliki wawasan yang luas untuk memberikan petunjuk sesuai dengan kebutuhan pengunjung.
- e. Tersedianya kebutuhan wisatawan yang berupa barang-barang ataupun jasa dengan kualitas serta tingkat harga/sewa yang wajar.
- f. Tersedianya beberapa atraksi yang lebih menarik sehingga dapat memberikan kesan yang sifatnya informatif dan hiburan.

5.11 Analisis Fasilitas Pendukung dan Utilitas Kawasan

5.11.1 Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendukung / Pengunjung

Kebutuhan akan fasilitas sosial ekonomi berfungsi memberikan pelayanan kepada pengunjung dan masyarakat

setempat untuk melakukan aktifitas ekonomi yang akan dikembangkan dalam kawasan, sehingga mendukung kegiatan pariwisata di masa yang akan datang termasuk menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung.

Seiring dengan itu akan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat, dari hasil kegiatan pariwisata yang memberikan efek tetesan (trickle down) kepada masyarakat setempat. Tetapi masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan objek wisata Pantai Palippis adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia yang lebih ditekankan pada analisis yang menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana terutama akomodasi.

Sarana akomodasi memiliki pengaruh terhadap wisatawan yang berkunjung pada objek wisata, ini akan berdampak pada lamanya wisatawan berada di tempat wisata. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa sarana akomodasi pada objek wisata Pantai Palippis belum tersedia sehingga wisatawan yang berkunjung hanya untuk waktu yang singkat atau waktu satu hari. Untuk meningkatkan arus wisatawan maka perlu adanya fasilitas penunjang/pendukung. Adapun jenis akomodasi yang dapat dikembangkan pada objek wisata Pantai Palippis adalah :

a. Sarana Darat

- Pelayanan umum seperti : penambahan pondok/ tempat istirahat, kantin/cafe, rumah makan khas, souvenir dan tempat pertunjukan, serta tempat bermain.
- Sarana penunjang antara lain : tempat parkir, gazebo, penataan taman dan ruang ganti.

b. Sarana Pantai

- Sarana olah raga air / pantai antara lain : kolam untuk berenang
- Pembangunan menara pengawas dan pos keamanan di pantai sebagai penunjang bagi keamanan para pengunjung/wisatawan.

5.11.2 Analisis Sistem Utilitas Kawasan

Sesuai dengan hasil survey sistem utilitas pada objek wisata Pantai Palippis sebagian besar belum tersedia. Pengembangan utilitas pada objek wisata Pantai Palippis perlu dipertimbangkan mengingat sistem tersebut merupakan bagian terpenting dalam mendukung aktifitas wisatawan. Jaringan utilitas yang diadakan akan disesuaikan dengan upaya pengembangan kawasan yang mengarah pada skala pelayanan lokal yaitu meliputi :

a. *Sistem Penyediaan Air Bersih*

Pemenuhan akan kebutuhan air bersih kawasan mutlak untuk dipenuhi baik terhadap masyarakat maupun wisatawan. Saat ini penyediaan air bersih pada objek wisata Pantai Palippis masih menggunakan air bersih yang berasal dari air tanah atau sumur gali. Masih diperlukan penyediaan air bersih perpipaan mengingat kebutuhan untuk wisatawan harus terpenuhi demi kenyamanan wisatawan. Untuk pemenuhan air bersih harus disesuaikan dengan jumlah pengunjung yang akan datang serta kemampuan distribusi oleh PDAM setempat dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fasilitas yang akan dikembangkan.

b. Sistem Jaringan Listrik

Pengadaan jaringan listrik kawasan akan disesuaikan dengan kemampuan pembangkit listrik PT. PLN. Besarnya tingkat kebutuhan didasarkan pada unit kegiatan yang akan dibangun, baik untuk sistem sambungan tegangan tinggi maupun tegangan menengah, dengan kebutuhan daya untuk masing-masing fasilitas.

c. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi dimaksudkan untuk menjamin kelancaran dalam komunikasi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pengelolaan objek wisata maupun

komunikasi untuk wisatawan. Fasilitas komunikasi yang ada pada objek wisata Pantai Palippis saat ini sudah dijangkau oleh jaringan seluler.

d. Sistem Jaringan Drainase

Dalam arahan sistem saluran drainase perlu melihat karakter limbah yang akan dibuang melalui saluran drainase tersebut, guna menjaga kenyamanan wisatawan dan meningkatkan kesehatan lingkungan sehingga diupayakan agar air limbah dapat terpisah pada masing-masing saluran drainase.

Saluran drainase dimaksudkan agar air limbah tersebut tidak menimbulkan pencemaran. Untuk itu desain saluran drainase diupayakan dibuat tertutup untuk menghindari bau busuk, dan tidak dibuang langsung ke pantai tetapi dialirkan ke septic tank atau ke saluran induk dan selanjutnya dialirkan ke laut.

e. Persampahan

Sesuai dengan kondisi kawasan wisata, maka diperlukan berbagai pertimbangan dalam pengelolaan persampahan. Hal ini didasarkan pada keadaan objek wisata serta komponen fasilitas yang ada di dalamnya, sehingga pengelolaan difokuskan antara lain :

1. Tetap memperhatikan kawasan tertentu yang dianggap menghasilkan sampah yang cukup besar.
2. Daerah sekitar fasilitas perdagangan, sekitar hunian dan lain sebagainya.
3. Daya tampung tempat sampah harus sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan.

Dengan dasar kriteria dan pertimbangan dalam pemilihan lokasi pelayanan sistem jaringan persampahan, maka kawasan wisata diupayakan harus tetap bersih dan nyaman.

5.11.3 Analisis Potensi Kawasan Wisata Pantai Palippis

Analisis berdasarkan potensi kawasan, diarahkan terhadap perumusan hasil analisis pengembangan yang lebih terarah, sehubungan dengan karakteristik fisik kawasan serta potensi sumber daya yang ada.

Adapun potensi yang dimiliki objek wisata Pantai Palippis adalah :

- a. Berjemur di pasir putih,
- b. Laut yang berombak dan jernih,
- c. Batuan cadas yang berada di pinggiran pantai dan pepohonan yang rindang di sepanjang garis pantai.

Sesuai dengan hal tersebut memungkinkan diadakan alternatif pemilihan lokasi pada daerah pesisir pantai bagian

Timur dan bagian Selatan kawasan wisata Pantai Palippis. Panjang bentangan pasir putih berkisar kurang lebih 3 Km cukup aman dari pengaruh pasang surut air laut dengan kategori jarak garis pantai ke laut berkisar 30 meter memungkinkan diadakan kegiatan olah raga pantai dan sekaligus dapat menikmati keindahan alam lainnya. Sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan, salah satu potensi objek wisata Pantai Palippis yang dapat dikembangkan adalah berupa pesta adat nelayan yang hanya berlangsung pada waktu-waktu tertentu. Objek wisata tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu daya tarik dan karakteristik kawasan, yang diharapkan dapat berimbas pada intensitas kunjungan pada objek wisata Pantai Palippis.

Untuk menjadikan objek wisata Pantai Palippis sebagai objek wisata yang berpotensi di masa mendatang, maka perlu diperhatikan kebutuhan-kebutuhan para pengunjung/ wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dalam hal ini sarana dan prasarana yang memadai pada objek wisata Pantai Palippis.

5.12 Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Wisata

Setelah melakukan penilaian terhadap potensi pengembangan pariwisata, selanjutnya adalah penentuan strategi dalam

pengembangan objek wisata Pantai Palippis. Adapun analisis strategi pengembangan objek wisata digambarkan dengan menggunakan Analisis SWOT, yaitu dengan menentukan faktor internal dan eksternal.

5.12.1 Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

Sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan objek wisata Pantai Palippis, maka dalam pengembangan tersebut tetap melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan objek wisata. Adapun peluang dalam pengembangan objek wisata Pantai Palippis adalah :

- Adanya keinginan pemerintah untuk pengembangan objek wisata.
- Semakin bertambahnya minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata.
- Dukungan kuat dari masyarakat untuk pengembangan objek wisata Pantai Palippis.

b. Ancaman (Threat)

Ancaman merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam melakukan pengembangan pariwisata di mana beberapa gejolak yang sifatnya dari luar yang akan berdampak pada proses pengembangan objek wisata.

Adapun ancaman dalam pengembangan objek wisata Pantai Palippis adalah :

- Kemungkinan masuknya budaya asing yang bertentangan dengan budaya setempat.
- Persaingan antar objek wisata untuk menarik minat wisatawan
- Kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan.

5.12.2 Faktor Internal

a. Kekuatan (Strength)

Faktor kekuatan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka melakukan pengembangan objek wisata Pantai Palippis, adapun faktor-faktor kekuatan yang mendukung dalam pengembangan objek wisata Pantai Palippis di Desa Bala adalah :

- Memiliki keindahan alam yang menarik seperti suasana ombak, air laut yang jernih, batuan cadas di pinggiran pantai dan adanya pepohonan yang menjadi tempat pelindung.
- Aksesibilitas kawasan dekat dengan ruas jalan.
- Adanya pasir putih.
- Kondisi budaya yang memiliki sifat keramahmatan penduduk yang masih alami.

b. Kelemahan (Weakness)

Faktor kelemahan merupakan faktor yang dapat menghambat pengembangan objek wisata di Desa Bala, faktor ini sifatnya berasal dari dalam yang terkait dalam usaha pengembangan objek wisata. Adapun faktor-faktor kelemahan tersebut kaitannya dalam pengembangan objek wisata adalah :

- Kurang adanya promosi.
- Masih minimnya sarana wisata seperti rumah makan dan tempat istirahat (gazebo).
- Kualitas sumber daya manusia yang rendah.
- Kurangnya dana untuk membenahi objek wisata Pantai Palippis.

Berdasarkan penilaian pada setiap faktor internal dan eksternal dalam strategi pengembangan objek wisata Pantai Palippis, maka dapat dilakukan alternatif strategi dalam melakukan pengembangan objek wisata adalah sebagai berikut :

a. Strategi Kombinasi antara Kekuatan dan Peluang (SO)

Strategi ini adalah menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang dalam pengembangan objek wisata. Adapun strategi yang dapat dimanfaatkan adalah :

- Pemanfaatan dan pengembangan potensi alam sebagai tempat wisata pantai.
 - Memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pengembangan objek wisata.
- b. Strategi Kombinasi antara Kekuatan dan Ancaman (ST)
- Strategi ini menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menghindari ancaman, yaitu :
- Mempertahankan budaya asli daerah dengan tetap mengembangkan budaya yang ada.
 - Pengembangan seluruh potensi yang dimiliki serta melakukan kegiatan promosi wisata untuk menarik wisatawan.
- c. Strategi Kombinasi antara Peluang dan Kelemahan (WO)
- Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan mengatasi kelemahan yang dimiliki yaitu :
- Perlunya peningkatan ketersediaan fasilitas wisata.
 - Dijadikan salah satu program pembangunan daerah kepariwisataan.
- d. Strategi Kombinasi antara Kelemahan dan Ancaman (WT)

Strategi ini digunakan untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman yaitu :

- Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan objek wisata.
- Melakukan penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata.

Tabel 10
Analisis Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Palippis

IFAS EFAS	<p>Kekuatan (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki keindahan alam yang menarik seperti suasana ombak, air laut yang jernih, batuan cadas di pinggiran pantai dan adanya pepohonan yang menjadi tempat pelindung. ▪ Aksesibilitas kawasan dekat dengan ruas jalan. ▪ Adanya pasir putih. ▪ Kondisi budaya yang memiliki sifat keramahmataman penduduk yang masih alami. 	<p>Kelemahan (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang adanya promosi. ▪ Masih minimnya sarana wisata seperti rumah makan dan tempat istirahat (gazebo). ▪ Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah. ▪ Kurangnya dana untuk membenahi objek wisata Pantai Palippis.
<p>Peluang (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya keinginan pemerintah untuk pengembangan kawasan. ▪ Semakin bertambahnya minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata. ▪ Dukungan kuat dari masyarakat untuk mengembangkan objek wisata Pantai Palippis. 	<p>Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan dan pengembangan potensi alam untuk menarik wisatawan datang berkunjung. ▪ Memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pengembangan objek wisata. 	<p>Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya peningkatan ketersediaan fasilitas wisata. ▪ Dijadikan salah satu program pembangunan daerah kepariwisataan.
<p>Ancaman (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemungkinan masuknya budaya asing yang bertentangan dengan budaya setempat. ▪ Persaingan antar objek wisata untuk menarik minat wisatawan ▪ Kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. 	<p>Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertahankan budaya asli daerah dengan tetap mengembangkan budaya yang ada. ▪ Pengembangan seluruh potensi yang dimiliki serta melakukan kegiatan promosi wisata untuk menarik wisatawan. 	<p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan objek wisata. ▪ Melakukan penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata.

5.12.3 Analisis SWOT Bagi Pengembangan Kawasan Objek Wisata Pantai Palippis

Sesuai dengan hasil Analisis SWOT maka dapat dirumuskan prioritas utama strategi pengembangan objek wisata Pantai Palippis adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata.
- Meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan dan pengembangan daya tarik potensi kawasan.
- Kerjasama antara pihak pengelola dan pihak pemerintah sangat diperlukan dalam peningkatan objek wisata Pantai Palippis.
- Melakukan kegiatan promosi untuk menarik wisatawan.

5.13 Analisis Pengembangan Penzanaan

Dalam mengembangkan suatu kawasan rekreasi maka perlu dibuat zona-zona yang masing-masing mempunyai fungsi tersendiri yang didasarkan pada potensi masing-masing zona.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan arahan pengembangan untuk pembagian masing-masing fungsi di dalam kawasan. Penetapan zoning kawasan selain didasarkan pada fungsi

utama kawasan sebagai kawasan wisata pantai juga mempertimbangkan kondisi topografi dan kemampuan lahan, sehingga dalam pembangunan nantinya dapat berlangsung terus untuk masa yang akan datang. Adapun konsep pengembangan Zona berdasarkan analisis kriteria dan kondisi wilayah dapat dibedakan menjadi :

1. Zona A

Zona ini merupakan kawasan kegiatan di mana potensi yang dimiliki oleh tempat ini adalah :

- Memiliki objek wisata alam itu sendiri.
- Panorama yang cukup menarik sehingga dapat menikmati keindahan alam secara langsung.
- Dukungan sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana ini belum memadai atau belum ada sama sekali, jadi wisatawan yang berkunjung hanya beristirahat di rumah-rumah masyarakat untuk sementara.

2. Zona B

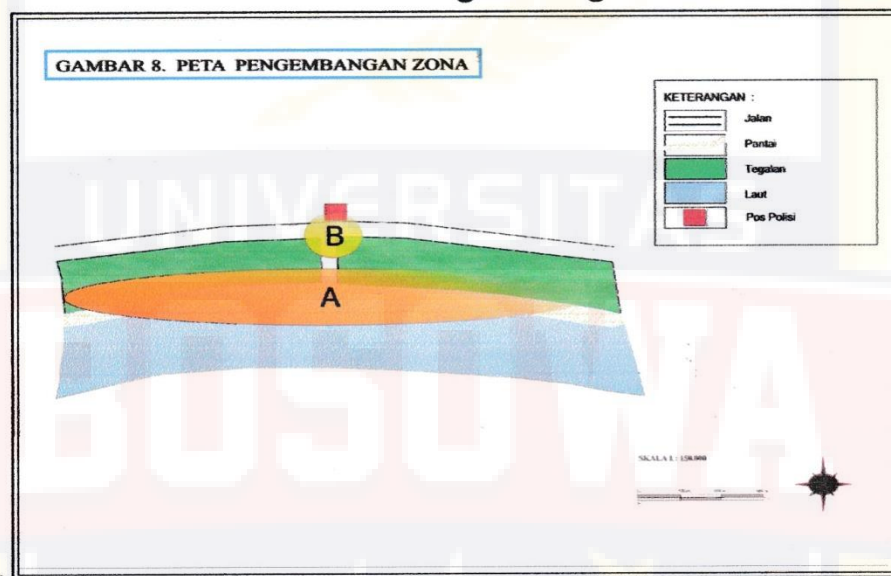
Merupakan zona khusus pengembangan untuk pengelolaan objek wisata Pantai Palippis terutama untuk memudahkan pengelolaan mengontrol wisatawan yang datang berkunjung.

Zona ini memiliki potensi seperti :

- Dekat dengan jalan poros dan pintu gerbang yang akan ditempatkan di daerah ini.

- Penyediaan kantor pengelola dan pos penjagaan yang ditempatkan di wilayah ini untuk memudahkan retribusi.
- Pemenuhan kebutuhan tempat bermain untuk anak-anak yang belum dapat berenang.

Gambar 8. Peta Pengembangan Zona



5.14 Analisis Arah Pengembangan Objek Wisata Pantai Palippis

Berdasarkan hasil analisis kriteria penilaian potensi pengembangan objek wisata Pantai Palippis berdasarkan pembagian zona, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

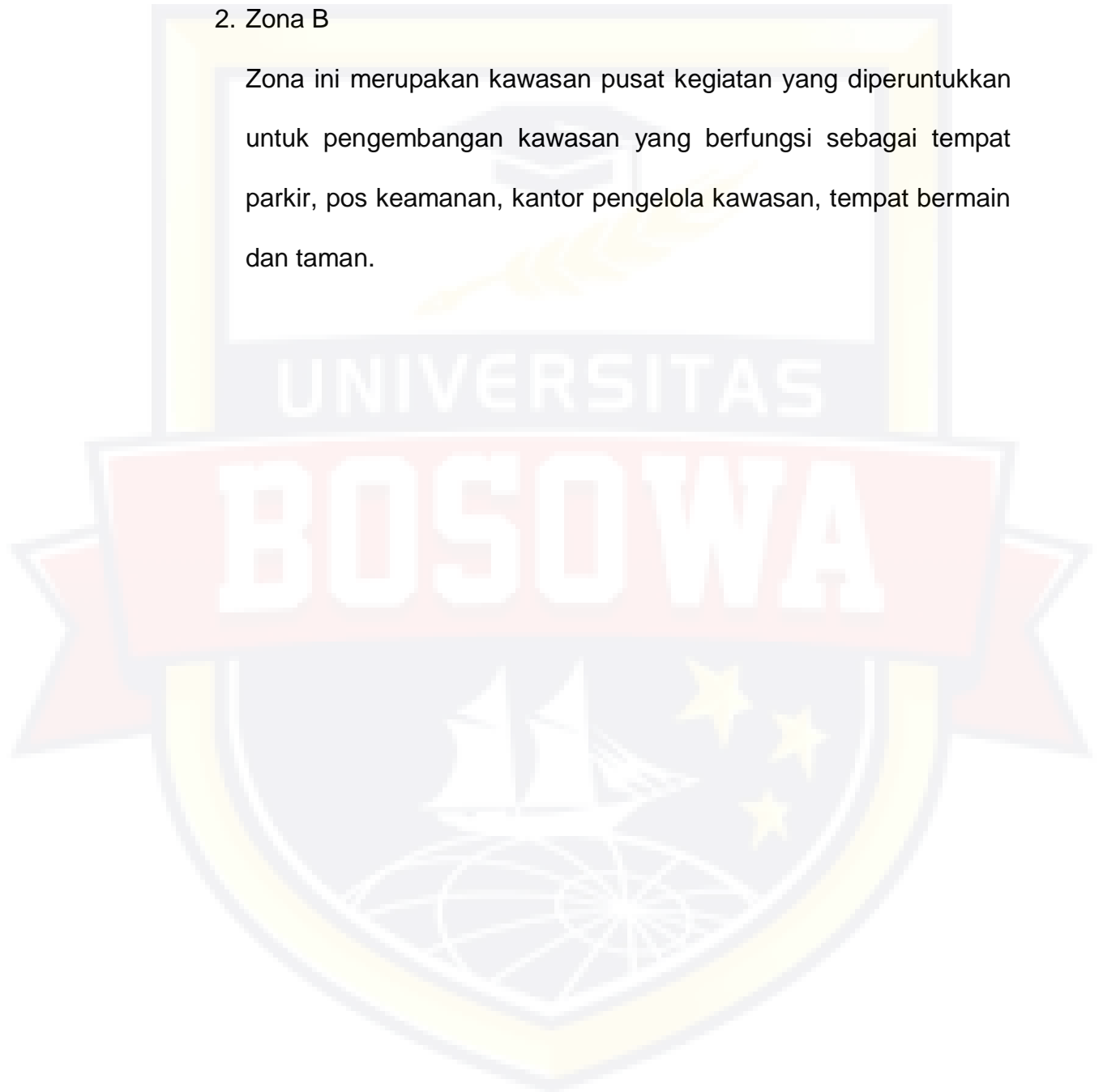
1. Zona A

Zona ini merupakan pendukung kawasan wisata yang diperuntukkan untuk pondok/tempat istirahat, kamar ganti,

perlengkapan berenang, mushollah, souvenir, rumah makan khas dan tempat atraksi,

2. Zona B

Zona ini merupakan kawasan pusat kegiatan yang diperuntukkan untuk pengembangan kawasan yang berfungsi sebagai tempat parkir, pos keamanan, kantor pengelola kawasan, tempat bermain dan taman.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Potensi objek wisata Pantai Palippis yang menjadi andalan untuk menarik wisatawan agar semakin banyak berkunjung adalah pasir putih, ombak, karang, pepohonan alami dan panorama alami.
2. Sesuai dengan hasil Analisis SWOT maka dapat dirumuskan prioritas utama strategi pengembangan objek wisata Pantai Palippis adalah sebagai berikut :
 - Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata.
 - Mengembangkan budaya asli daerah dengan tetap memelihara budaya yang ada.
 - Meningkatkan dan mengembangkan daya tarik potensi kawasan.
 - Melakukan kegiatan promosi wisata untuk menarik wisatawan.

6.2 Saran

Adapun beberapa saran yang bersifat masukan terkait dengan pengembangan objek wisata Pantai Palippis antara lain :

1. Untuk mengembangkan kawasan objek wisata Pantai Palippis sebagai tempat wisata, maka perlu peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya menarik wisatawan agar merasa nyaman untuk tinggal lama di lokasi objek wisata.
2. Pihak pemerintah daerah perlu melakukan promosi dan pemasaran objek wisata Pantai Palippis untuk memperkenalkan objek wisata agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung.
3. Agar dapat ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Elfira Mansyur, 2003, *Kajian Daya Tarik Wisata dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lamangkia Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan*, Tesis, Program Pasca Sarjana UGM: Yogyakarta.
- Gunawan, 1997, *Perencanaan Pariwisata*, Jurnal PWK, ITB: Bandung.
- Gunawan, Myra P., 1993, *Perencanaan Pariwisata: Apa & Mengapa?*, Jurnal PWK No. 7/Maret/1993: Bandung.
- Hadinoto, Kusidianto, 1996, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Host & Guest, 1989, *The Antropology of Tourism*, ed Valene L. Smith, University of Pemsylvania Press: Jakarta.
- Ibrahim, Syahrul, 1999, *Paradigma Baru Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang*, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, ed. Perdana hal. 11-14: Jakarta.
- Indro S., 1989, *Seminar Regional Kepariwisataaan*, Surakarta: Jawa Tengah.
- Inskeep E., 1991, *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*, Van Nostrad Reinhold: New York.
- Masengi, Chris P., 1999, *Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang: Mendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat*, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Edisi , hal. 11-14: Jakarta.
- Mc. Intosh/Goeldener, 1996, *Tourism Principle, Practice, Philosophies*, Canada: John Wiley and Sons, Inc: Canada.
- Nelson, J. G. Butler, R. and Wall G., 1993, *Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning and Managing*, Departement of Geography, University of Waterloo: Berlin.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan*, 1990

Pemerintah Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*, 1990

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia*, 1960

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS*, 1985

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, 1999

Puspar UGM, 1997, *Studi Penyusunan Pedoman Pantai Lestari*, Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi: Jogjakarta.

Putra H. S. A. dan Raharjana D. T., 2001, *Dampak Sosial Budaya Pengembangan Pariwisata*, Jurnal Nasional Pariwisata Vol. 1 No. 1, Mei 2001, ITB: Bandung.

Soekadijo R. G., 1996, *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage)*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Suwardjoko P. Warpani, Indira P. Warpani, 2007, *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*, Penerbit ITB: Bandung.

Yoeti, Oka, 1978, *Tourist & Travel Management*, Pradnya Paramita: Jakarta.

Yoeti, Oka, 1989, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Pradnya Paramita: Jakarta.

